

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kebijakan Pendidikan

##### 1. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Teori-teori kebijakan banyak sekali dijelaskan oleh para ahli, Kebijakan dalam maknanya seperti ini berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.<sup>1</sup>

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho menyatakan bahwa memberikan pengertian bahwa kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari musyawarah mengenai tindakan dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>2</sup>

Kebijakan adalah sebuah rekayasa sosial. Kebijakan umumnya dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Pengertian ini memberikan makna bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan, yang berarti tindakan tersebut tidak terbatas satu tindakan, melainkan beberapa tindakan. Tindakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu yaitu dengan mengubah perilaku masyarakat melalui rekayasa sosial. Itulah sebabnya istilah

---

<sup>1</sup>Arif Rohman,. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: (Laksbang Mediatama Yogyakarta, 2009). hlm. 108.

<sup>2</sup> H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm. 16.

kebijakan dimaknai sebuah rekayasa sosial atau *social engineering*.<sup>3</sup> Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), serta istilah-istilah lain.<sup>4</sup>

Sedangkan Thomas Dye menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Sementara itu Laswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan menyebut kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*). Adapun Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). Senada dengan beberapa definisi tersebut, H. Hugh Heglo mengungkapkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some ends*” atau sebagai tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

---

<sup>3</sup> Sudiyono. *Dari Formulasi keImplementasi Kebijakan Pendidikan*. (Buku Ajar. Yogyakarta: FIP UNY. 2007), hlm.3-4.

<sup>4</sup> Arif Rohman, *Politik Ideologi ...*, . hlm. 108.

Keempat, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana.<sup>5</sup>

Sudiyono, menyatakan bahwa ada berbagai pemahaman tentang kebijakan dari berbagai ahli kebijakan negara antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai dan praktik artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial dan politik.
- b. Carl J. Fredrick memaknai kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh perorangan, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dengan memberikan gambaran tentang hambatan dan kesempatan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Artinya, kebijakan dapat berasal dari perorangan, kelompok maupun pemerintah. Tentu saja hal ini sangat tergantung pada sistem politik dan budaya suatu bangsa.
- c. James E. Anderson, merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang memiliki tujuan oleh sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan.

---

<sup>5</sup> Maryono, MM. Menakar Kebijakan RSBI: *Analisis Kritis Studi Implementasi*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka. 2010), hlm. 22-23.

<sup>6</sup> Sudiyono. 2007. *Dari...*, hlm. 3.

d. Thomas Dye menyatakan kebijakan negara sebagai apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Aktor utama kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Baginya, pemerintah melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan sebuah kebijakan.

Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikan dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*), serta istilah-istilah lain<sup>7</sup>. Lebih lanjut Arif Rohman menjelaskan, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Menurut Tilaar & Riant Nugroho<sup>8</sup> mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan dari proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>7</sup> Arif Rohman, . *Politik .....*, . hlm. 107-108.

<sup>8</sup> H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. *Kebijakan.....*, hlm. 140.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.<sup>9</sup>

Sistem persekolahan di Indonesia merupakan substantif dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dalam spektrum kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah.<sup>10</sup>

Selain itu, sekolah sebagai subsistem social berfungsi dalam mengintegrasikan semua subsistem yang ada di dalamnya. Baik penyusunan tujuan dan nilai dari masyarakat untuk menentukan tujuan sekolah, maupun penggunaan pengetahuan untuk menjalankan tugas sekolah yaitu pengajaran dan pembelajaran sesuai tuntutan keperluan masyarakat sebagai suatu keunikan. di dalamnya diperlukan pengetahuan tentang pendidikan, psikologis, komunikasi,

---

<sup>9</sup> Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008) hlm. 36.

<sup>10</sup> Syafarudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), hlm. 102.

bahasa dan lain sebagainya bagi pelaksanaan tugas pengajaran dan pembelajaran.<sup>11</sup>

Menurut Owens, dalam bukunya Syafarun dituilskan bahwa dalam pandangan sosiologis dan psikologis, disetujui bahwa tujuan persekolahan adalah: 1) prestasi akademik, 2) kebiasaan kerja yang efektif. 3) nilai kewarganegaraan. 4) perilaku sosial. 5) harga diri. 6) percaya diri.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran aktivitas persekolahan adalah: 1) pengharapan guru terhadap pencapaian prestasi pelajar, 2) hubungan antara pelajar dengan guru, 3) motivasi pelajar, 4) waktu yang dihabiskan untuk pengajaran dan pembelajaran, 5) hubungan antara individu pelajar dan teman sejawat. Untuk mencapai sasaran tersebut, ahli sosiologi dan pendidikan cenderung menekankan kepada: 1) bagaimana sekolah memimpin dan mengelola, 2) bagaimana murid dikelompokkan, 3) keterlibatan orang tua dan masyarakat, 4) cara pelajar dan guru bekerja sama, 5) cara keputusan dibuat di sekolah.<sup>12</sup>

Menurut Caldwell dan Spinks, dalam bukunya Syafarudin, dinyatakan bahwa manajemen kolaboratif, mencakup enam fase, yaitu: 1) penyusunan sasaran dan identifikasi kebutuhan, 2) pembuatan kebijakan dengan kebijakan yang terdiri dari pernyataan tujuan dan garis panduan luas bagi tindakan, 3) perencanaan berbagai program, 4) persiapan dan menetapkan program anggaran, 5) pelaksanaan, dan 6) evaluasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 103-104.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 111.

## 2. Syarat Implementasi Kebijakan

Syarat terkait implementasi kebijakan dijelaskan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam buku *Politik Ideologi Pendidikan* sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius
- b. Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- g. Adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

---

<sup>14</sup> Arif Rohman, *Politik* ...., hlm. 136.

### 3. Perumusan Kebijakan Pendidikan

Dalam kajian pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan, Arif Rohman, membagi ke dalam dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Kedua pendekatan tersebut adalah: *Social Demand Approach*, dan *Manpower Approach*.<sup>15</sup>

#### a. *Social demand approach*

*Social demand approach* merupakan suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan atas aspirasi atau segala tuntutan dan kehendak masyarakat. Dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa segala tuntutan yang diserukan oleh masyarakat menjadi agenda perumusan kebijakan pendidikan. Pada pendekatan ini, para pengambil kebijakan terlebih dahulu melihat dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan tersebut.

Dalam *social demand approach* partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting. Partisipasi masyarakat dari seluruh lapisan terjadi baik dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Akan tetapi sebenarnya dalam pendekatan ini tidak semata mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskan kebijakan pendidikan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Model pendekatan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 114-116.

ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat dan pada saat kebijakan diimplementasikan untuk mendapat dukungan dari masyarakat.<sup>16</sup>

b. *Manpower approach*

*Manpower approach* terlihat sangat berbeda dengan social demand approach. Pendekatan perumusan kebijakan ini menitikberatkan pada pertimbangan rasional dan visioner dalam menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (human resources) yang memadai di masyarakat. Keberhasilan *manpower approach* ini akan tergantung pada kemampuan dari seorang pemimpin dari sudut pandang pengambil kebijakan. Hal yang terpenting dalam *manpower approach* adalah factor dari seorang pemimpin yang baik yang dapat menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan dan memiliki visi-misi yang jelas. Seorang pemimpin tidak hanya menjalankan rutinitas kepemimpinannya akan tetapi juga harus memiliki pandangan dan cita-cita yang akan dicapai bersama masyarakatnya serta cara-cara mencapainya.

*Man power approach* lebih bersifat otoriter. Pendekatan ini kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Pendekatan lebih otoriter terbukti dengan peran pemimpin yang dominan dalam perumusan suatu kebijakan. Perumusan kebijakan tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat,

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 118.

tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh pemimpin yang visioner. Kalaupun sangat terkesan otoriter, tetapi ada sisi positifnya, yaitu proses perumusan kebijakan pendidikan lebih berlangsung efektif dan efisien.

## 5. Pendekatan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Buku yang ditulis oleh Arif Rohman,<sup>17</sup> menyatakan bahwa pendekatan implementasi kebijakan pendidikan yang dijelaskan oleh beberapa ahli ilmu sosial menyebutkan ada empat pendekatan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan yaitu:<sup>18</sup>

### a. Pendekatan struktural (*structural approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan pengawasan menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Namun titik lemah dari pendekatan struktural ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

### b. Pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approach*).

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 140.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 141-144.

Pendekatan prosedural dan manajerial dikembangkan dalam rangka suksesnya implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan prosedural dan manajerial ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana yang cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang tepat.

Ada tiga prosedur langkah-langkah yang tepat di dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Membuat disain program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.
- 2) Melaksanakan program kebijakan dengan cara mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode yang tepat.
- 3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

c. Pendekatan perilaku (*behavioural approach*)

Pendekatan perilaku ini berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik adalah bila perilaku manusia beserta segala sikap juga harus dipertimbangkan dan dipengaruhi agar

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 146.

proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung baik, namun di tengah jalan banyak terjadi penolakan-penolakan (*resistance*) di masyarakat. Bahkan beberapa anggota pelaku pelaksananya merasa pasif dan sedikit acuh tak acuh.

d. Pendekatan politik (*political approach*)

Pendekatan ini lebih melihat pada fakto-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam suatu organisasi, selalu ada perbedaan dan persaingan antar individu atau kelompok dalam memperebutkan pengaruh. Sehingga ada kelompok-kelompok individu yang dominan serta ada yang kurang dominan, ada yang kelompok-kelompok pengikut dan ada sekelompok penentang. Dalam hal ini, pendekatan politik selalu mempertimbangkan atas pemantauan kelompok pengikut dan kelompok penentang beserta dinamikanya.

## 6. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut dari perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran (*target groups*), melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Kesemuanya itu menunjukkan secara

spesifik dari proses implementasi yang sangat berbeda dengan proses formulasi kebijakan pendidikan.<sup>20</sup>

Implementasi kebijakan pendidikan sebenarnya tidak menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara hirarkis dilakukan dari paling atas kantor Kementerian Pendidikan sampai dengan paling bawah yaitu Ranting Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama dan saling bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan tersebut.<sup>21</sup> Arif Rohman juga menyebutkan dalam bukunya ada beberapa teori implementasi kebijakan pendidikan menurut beberapa ahli : (a) Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, (b) Van Meter dan Van Horn, (c) Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

a. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna, maka diperlukan banyak sekali syarat, diantaranya:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius.
- 2) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus tersedia.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 136-140.

- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7) Adanya pemahaman yang dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn, menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan kedalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Kemudian Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teorinya tentang implementasi dengan menentukan enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja kebijakan. Keenam variabel tersebut meliputi: 1) standar dan tujuan

kebijakan; 2) sumberdaya; 3) komunikasi; 4) interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; 5) karakteristik agen pelaksana; 6) kondisi sosial, ekonomi dan politik serta karakter pelaksana.

c. Daniel mazmanian dan paul A. Sabatier

Teori yang dikembangkan oleh Daniel mazmanian dan paul A. Sabatier ini menurut beberapa ahli disebut sebagai '*a frame work for implementation analysis*' atau kerangka analisis implementasi (KAI) yang mana kerangka analisis implementasi tersebut berperan untuk mengidentifikasi variable-variabel yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel yang dapat mempengaruhi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yang meliputi:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan
- 2) Kemampuan dan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- 3) Pengaruh langsung berbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

## 7. Landasan Hukum Kebijakan Pendidikan Karakter

Sejak tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional sudah menentukan arah dan kebijakan serta prioritas pendidikan karakter, ditegaskan bahwa pendidikan karakter sudah menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). yaitu:<sup>22</sup>

“...terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks”.

Terkait hal tersebut untuk melaksanakan fungsi dan tujuan pendidikan karakter telah diterbitkan juga oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo yakni keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 65 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan atau sekolah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs. Selanjutnya, pasal 7 dinyatakan bahwa penguatan pendidikan karakter dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidikan karakter yang dimaksud pada satuan pendidikan adalah mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Dari 20 (dua puluh) nilai karakter terkristalisasi menjadi 5 (lima) nilai karakter utama, yaitu: religious, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

<sup>23</sup> Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kabupaten Kulon Progo, 2017. hlm.

Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya Peraturan Bupati Kulon Progo tersebut adalah permasalahan budaya bangsa yang menjadi tanggungjawab semua komponen masyarakat. Pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan karakter perlu dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan dunia industri serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Strategi penumbuhan kerekter dilakukan melalui keteladanan, intervensi, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten.<sup>24</sup>

Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan manusia dimasa depan. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat. Sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat, pantang menyerah, berani mengalami proses panjang, serta menerjang arus badai yang bergelombang dan bahaya. Karakter yang kuat merupakan prasarat untuk menjadi seorang pemenang dalam medan kompetisi kuat seperti saat ini dan yang akan datang, yang terkenal dengan era kompetitif. Bagi seorang yang berkarakter lemah, tidak akan ada peluang untuk menjadi pemenang. Ia hanya menjadi pecundang dimasyarakat, teralienasi, dan termarginalkan dalam proses kompetisi yang ketat. Sebab ia mudah menyerah, tidak mempunyai prinsip, pragmatis dan oportunistis. Oleh karena itu pendidikan karakter menjadi keniscayaan bagi

---

<sup>24</sup> Pedoman Pelaksanaan .... hlm. 20.

bangsa ini untuk membangun mental pemenang bagi generasi bangsa dimasa yang akan datang.<sup>25</sup>

Mengingat fakta demoralisasi sudah sedemikian akut, pendidikan sekolah selama ini bisa dikatakan gagal pada aspek karakter. Sekolah terlalu terpesona dengan target-target akademis, dan melupakan pendidikan karakter. Realitas ini membuat kreatifitas, keberanian menghadapi resiko, kemandirian, dan ketahanan melalui berbagai ujian hidup menjadi rendah. Anak mudah frustrasi, menyerah, dan kehilangan semangat juang sampai titik darah penghabisan.<sup>26</sup>

Dengan melihat kenyataan itulah, pendidikan karakter sangat mendesak untuk dilaksanakan di sekolah khususnya. Caranya adalah dengan mengoptimalkan peran sekolah sebagai pionir. Selain sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter juga pihak lain seperti keluarga, masyarakat dan elemenelemen lain bangsa ini untuk mensukseskan pendidikan karakter.<sup>27</sup>

## **B. Pendidikan Karakter**

### **1. Pengertian Pendidikan Karakter**

Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa

---

<sup>25</sup> Jamal Ma'mun Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 19.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 26.

kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>28</sup> Pendidikan adalah upaya normatif untuk membantu orang lain berkembang ke tingkat normatif lebih baik. Menurut pendapat Qodri Azizy pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian peserta didik.<sup>29</sup>

Sementara Agus Wibowo,<sup>30</sup> bahwa pendidikan karakter dapat diartikan sebagai: Pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif, jadi yang diperlukan dalam pendidikan karakter tidak cukup dengan pengetahuan lantas melakukan tindakan yang sesuai dengan

---

<sup>28</sup> Peraturan Bupati KP Nomor 65 tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter, hlm. 4.

<sup>29</sup> Qodri Azizy, *Membangun Integritas Bangsa*, (Jakarta: Renaisan, 2004), hlm. 73.

<sup>30</sup> Mohamad Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. (Bandung: Angkasa, 2013), hlm. 36.

pengetahuan saja. Hal ini karena pendidikan karakter terkait erat dengan nilai dan norma. Oleh karena itu, harus juga melibatkan perasaan.<sup>31</sup>

Beberapa Tokoh Memiliki persepsi macam-macam tentang karakter, diantaranya: Menurut Simon Philips dalam Masnur Memberikan pengertian bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi suatu pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.<sup>32</sup> Sementara itu Koesuma menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai Ciri atau Karakteristik atau Gaya atau Sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya, misalnya keluarga, masyarakat, atau bisa pula merupakan bawaan yang dibawa sejak lahir.<sup>33</sup>

Sementara istilah karakter dalam *American Dictionary of the English Language*,<sup>34</sup> didefinisikan sebagai kualitas-kualitas yang teguh dan khusus yang dibangun dalam kehidupan seseorang yang menentukan responnya tanpa pengaruh dengan kondisikondisi yang ada. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional,<sup>35</sup> karakter adalah: Watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan

---

<sup>31</sup> Akhmad Muhaimin Azzet, *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 27.

<sup>32</sup> Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter menjawab tantangna krisis Multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 70.

<sup>33</sup> Doni Koesuma A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo: 2010), hlm. 80.

<sup>34</sup> Agus Wibowo. *Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Agus Wibowo. 2012), hlm. 8.

<sup>35</sup> Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan pengembangan Pusat Kurikulum, hlm. 3.

untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang disebutkan dalam Pasal 1 bahwasanya Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah: Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Gerakan PPK dapat dimaknai sebagai pengejawantahan Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut, gerakan PPK perlu mengintegrasikan, memperdalam, memperluas, dan sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sampai sekarang.<sup>36</sup>

Pendidikan karakter pada satuan pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang meliputi: a). religius; b). jujur; c).

---

<sup>36</sup> Kemendikbud, ... hlm. 5.

toleransi; d). disiplin; e). kerja keras; f). kreatif; g). mandiri; h). demokratis; i). rasa ingin tahu; j). semangat kebangsaan; k). cinta tanah air; l). menghargai prestasi; m). bersahabat/komunikatif; n). cinta damai; o). gemar membaca; p). peduli lingkungan; q). peduli sosial; r). tanggung jawab; s). gotong royong; t). hormat; dan u). berbakti pada orang tua dan guru.<sup>37</sup>

18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas Pendidikan dewasa ini dituntut untuk dapat merubah peserta didik ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 Nilai Karakter yang akan ditamamkan dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Berikut akan dipaparkan mengenai 18 nilai dalam pendidikan karakter versi Kemendiknas:<sup>38</sup>

Tabel 2.1  
18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter

No.	Nilai	Deskripsi Perilaku
1.	Religious	Yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan.
2.	Jujur	Yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar) sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat

<sup>37</sup> Peraturan Bupati KP Nomor 65 tahun 2017, tentang Penguatan Pendidikan Karakter, hlm. 6-7.

<sup>38</sup> Suyadi. *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013). Hal 8-9.

		dipercaya.
3.	Toleransi	Yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut.
4	Disiplin	Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku.
5	Kerja keras	Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.
6	Keratif	Keratif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya.
7	Mandiri	Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain.
8	Demokratis	Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.
9	Semangat kebangsaan atau nasionalisme	Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan.
10	Rasa ingin tahu	Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap

		segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.
11	Cinta tanah air	Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.
12	Menghargai prestasi	Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi.
13	Komunikatif	Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik.
14	Cinta damai	Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu.
15	Gemar membaca	Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya.
16	Peduli lingkungan	Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
17	Peduli sosial	Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya.
18	Tanggung jawab	Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama.

## 2. Manajemen Pendidikan Karakter

Manajemen Secara bahasa (etimologi) manajemen berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Kata “*Management*” berasal dari bahasa latin “*mano*” yang berarti tangan, kemudian menjadi “*manus*” berarti bekerja berkali-kali.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi) terdapat banyak pendapat mengenai pengertian manajemen. Berikut ini disebutkan beberapa pendapat tokoh-tokoh dalam mendefinisikan arti manajemen diantaranya: Menurut Henry L Sisk dalam bukunya “*Principles of Management*” disebutkan *Management is the coordination of all resources through, the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives.*<sup>40</sup>

Artinya manajemen adalah proses pengkoordinasian seluruh sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, Menurut George R. Terry: Manajemen adalah suatu proses

---

<sup>39</sup> Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Educa, 2010), hlm.1.

<sup>40</sup> Henry L. Sisk, South western, *Principles Of Management*, ( Cincinnati Ohio: Philippine Copyright, 1969), hlm. 6.

khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya.<sup>41</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa manajemen merupakan sebuah proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang telah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan karakter yang efektif jika terintegrasi dalam manajemen sekolah, khususnya manajemen berbasis sekolah. Dengan kata lain, pendidikan karakter disekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah.<sup>42</sup> Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan (*planning*) dilaksanakan (*actuating*), dan dikendalikan (*evaluation*) dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai.

Pengelolaan tersebut antara lain seperti nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan atau komponen terkait lainnya. dengan demikian manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam aplikasi pendidikan karakter di sekolah. Dalam pendidikan karakter di

---

<sup>41</sup> Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.16.

<sup>42</sup> Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah; Konsep dan Praktik Implementasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 137.

sekolah, semua komponen harus dilibatkan.<sup>43</sup> Secara terperinci beberapa komponen yang direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan tersebut akan dijabarkan dalam beberapa hal dalam paragraf berikut.

- a. Perencanaan Pendidikan Karakter Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan.<sup>44</sup> Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang.
- b. Pengelolaan Komponen pengelolaan yaitu sumber daya manusia (SDM) yang mengurus penyelenggaraan sekolah, menyangkut pengelolaan dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina serta mengurus tata laksana sekolah untuk menciptakan budaya sekolah berbasis pendidikan karakter. Termasuk dalam komponen sekolah adalah kepala sekolah, konselor, pustakawan, staf tata usaha, dan office boy.
- c. Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam membentuk karakter serta mengembangkan potensi siswa. Keberadaan guru ditengah masyarakat bisa dijadikan teladan dan rujukan masyarakat sekitar. Bisa dikiaskan, guru adalah penebar cahaya kebenaran dan keagungan nilai. Hal inilah yang yang menjadikan guru untuk selalu *on the right track*, pada jalan yang benar tidak

---

<sup>43</sup> Novan Ardi Wiyani, *Manajemen Pendidikan Karakter*,....., hlm.78.

<sup>44</sup> Sugeng Listyo Prabowo & Faridah Nurmaliyah, *Perencanaan Pembelajaran: Pada Bidang Study, Bidang Study Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan dan Konseling*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 1.

menyimpang dan berbelok, sesuai dengan ajaran agama yang suci, adat istiadat yang baik dan aturan pemerintah.<sup>45</sup> Dalam proses belajar mengajar, guru mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, menilai dan mengevaluasi serta memberi fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan karakter. Guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Penyampaian materi pelajaran merupakan salah satu

- d. Siswa yaitu subjek belajar yang akan melalui proses transformasi nilai-nilai luhur dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah.<sup>29</sup> Dalam perencanaan karakter peserta didik hal yang perlu diperhatikan adalah tahap-tahap mengklasifikasikan pendidikan karakter terhadap peserta didik, karena tidak semua siswa diperlakukan sama, akan tetapi penanaman pendidikan karakter siswa yang diharapkan berjenjang sesuai umurnya.

### **3. Langkah-Langkah dan Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan dapat berupa berbagai kegiatan yang dilakukan secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi ke dalam

---

<sup>45</sup> Novan Ardi Wiyani, *Manajemen Pendidikan Karakter;...*, hlm. 82.

mata pelajaran, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran.<sup>46</sup>

Strategi dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sikap-sikap sebagai berikut:<sup>47</sup> Keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, penciptakan suasana yang kondusif, integrasi dan internalisasi, serta pembinaan.

Setelah melalui proses perencanaan program pendidikan tentu dilanjutkan dengan proses implementasi atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaan program pendidikan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun agar nantinya tujuan dari program dapat tercapai dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 dalam proses pelaksanaan program sekolah harus berdasarkan pedoman sekolah.

Jadi dalam pelaksanaan program pendidikan harus sesuai dengan rencana program pendidikan. Lebih tepatnya pelaksanaan program pendidikan menurut pedoman sekolah yang telah disusun berdasarkan rencana program baik tujuan program waktu tempat dan lain sebagainya. Hal ini berlaku untuk semua program sekolah termasuk penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan kebijakan program PPK harus sesuai rencana kerja sekolah dan berdasar pedoman sekolah yang telah dibuat agar nantinya pelaksanaan dapat terarah sesuai harapan.

---

<sup>46</sup> Bupati Kulon Progo, *Pengelolaan Pendidikan Karakter*, Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015.

<sup>47</sup> Heri gunawan, *Pendidikan Karakter "konsep dan Implementasi"* (Bandung: Cv.Alfabeta, 2012), hlm. 56.

Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan secara terpadu pada setiap kegiatan sekolah. Setiap aktivitas peserta didik di sekolah dapat digunakan sebagai media untuk menanamkan karakter, dan memfasilitasi peserta didik berperilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Dalam penyelenggaraan PPK dapat dilakukan melalui tiga jalur utama yaitu 1) pendidikan formal, 2) pendidikan non formal, 3) pendidikan informal.

Dalam proses penanaman 18 nilai karakter yang kemudian dikristalisasi menjadi 5 nilai utama dapat dilakukan melalui proses di atas. PPK dapat dilaksanakan secara integratif dan kolaboratif, sebagaimana yang dijelaskan Kemendikbud yaitu.<sup>48</sup>

- a. Integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan karakter dengan substansi mata pelajaran secara kontekstual. Kontekstual yang dimaksud dimulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan penilaian.
- b. Kolaboratif adalah pembelajaran yang mengkolaborasikan dan memberdayakan berbagai potensi sebagai sumber belajar dan/ atau pelibatan masyarakat yang mendukung Penguatan Pendidikan Karakter.

#### **4. Nilai-nilai Utama Pendidikan Karakter**

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita.

---

<sup>48</sup> Kemendikbud, Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter. (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 19.

Dalam hal ini butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan dalam mengelola sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK menempatkan nilai perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Religius

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.

Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri,

---

<sup>49</sup> Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, hlm 6-7.

kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, dan melindungi yang kecil dan tersisih.

b. Nasionalis

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

c. Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

d. Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan

persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

e. Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran.

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah perlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara kontekstual maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama

dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya.

## 5. Evaluasi Program Pendidikan Karakter

Dalam pelaksanaan berbagai program tentu menginginkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan suatu program pendidikan. Proses ini sering disebut evaluasi pendidikan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan.<sup>50</sup> Selain itu menurut Stufflebeam adalah<sup>51</sup> mengemukakan evaluasi pendidikan yaitu “*Focutional evaluation is the proses of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternative*”. Menurut rumusan tersebut evaluasi pendidikan adalah suatu proses mendeskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan informasi berguna untuk menetapkan alternatif keputusan.

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin, *Evaluasi Program...*, hlm. 2.

<sup>51</sup> Nur Aedi, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2016), hlm. 205.

Dari beberapa pengertian evaluasi pendidikan di atas dapat diketahui bahwa evaluasi program pendidikan merupakan proses mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang suatu program atau kegiatan yang sudah berjalan guna untuk menentukan alternatif keputusan. Alternatif keputusan tersebut sesuai kepentingan dari evaluator apakah program dapat dilanjutkan atau tidak dan lain sebagainya. Hasil evaluasi ini berguna untuk refleksi diri memilah berbagai program yang mempunyai hasil tinggi atau rendah sesuai indikator pencapaian yang telah disusun sebelumnya.

Menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali menyebutkan bahwa fungsi evaluasi antara lain:<sup>52</sup>

- a. Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.
- b. Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis
- c. Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, dan penyimpangan dilihat dari aspek tertentu misalnya program tahunan dan kemajuan belajar.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin secara garis besar evaluasi program di bagi menjadi beberapa tahapan yaitu:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Didin Kurniadin dan Imam Machali, *Manajemen Pendidikan Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 376.

a. Persiapan evaluasi program

Persiapan terdiri dari penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi instrumen evaluasi, jumlah sampel, penyamaan persepsi. Penyusunan evaluasi terkait model yang akan digunakan dalam proses evaluasi. Pemilihan model tergantung dengan tujuan evaluasi. Metode pengumpulan, alat pengumpul data, sasaran evaluasi, dan jadwal evaluasi yang akan digunakan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi program.

b. Pelaksanaan evaluasi program

Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Jenis evaluasi yang dipilih berguna untuk menentukan metode dan alat pengumpul data evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan hasil persiapan evaluasi program.

c. Monitoring pelaksanaan evaluasi

Monitoring pelaksanaan evaluasi memiliki dua fungsi yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program evaluasi dengan rencana evaluasi dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program evaluasi dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan (tujuan evaluasi). Fungsi yang kedua yaitu mengenali sejak dini peluang tercapainya tujuan evaluasi

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin, *Evaluasi Program...*, hlm. 108.

Jadi dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan selalu dilakukan proses evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan program tersebut dalam mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Hal tersebut termasuk dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter (PPK). Evaluasi dilakukan berdasarkan skema yang telah disetujui oleh tim PPK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Kemendikbud disebutkan bahwa tujuan evaluasi program PPK adalah:<sup>54</sup>

- a. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui efektivitas program Penguatan Pendidikan Karakter;
- b. Mendapatkan gambaran tentang capaian dari tujuan Penguatan Pendidikan Karakter;
- c. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter;
- d. Menilai keberhasilan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter;
- e. Menentukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter; dan
- f. Mengidentifikasi sustainability program Penguatan Pendidikan Karakter.

Evaluasi program PPK dilakukan melalui observasi (pengamatan langsung), analisis dokumen, survei, wawancara maupun diskusi data

---

<sup>54</sup> Kemendikbud, Panduan Penilaian Penguatan Pendidikan Karakter. (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 53.

untuk mengumpulkan data, baik data-data administratif maupun catatan-catatan pendukung untuk menilai sebuah program atau kegiatan.

Menurut kemendiknas proses evaluasi pendidikan karakter yaitu melalui tahapan sebagai berikut: Melakukan penilaian keberhasilan dan supervisi. Untuk keberlangsungan pelaksanaan pendidikan karakter perlu dilakukan penilaian keberhasilan dengan menggunakan indikator-indikator berupa perilaku semua warga dan kondisi sekolah/satuan pendidikan yang teramati. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus melalui berbagai strategi. Supervisi dilakukan mulai dari menelaah kembali perencanaan, kurikulum, dan pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Implementasi program pengembangan diri berkaitan dengan pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah/satuan pendidikan.
- b. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung implementasi pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa
- c. Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran
- d. Implementasi belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran
- e. Ketercapaian Rencana Aksi Sekolah/satuan pendidikan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter
- f. Penilaian penerapan nilai pendidikan karakter pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik (sebagai kondisi akhir)

---

<sup>55</sup> Kemendiknas, Panduan Pendidikan Karakter. (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan, Kemendiknas, 2011), hlm. 19.

- g. Membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir dan merancang program lanjutan.

Selain itu dalam proses evaluasi program PPK, sekolah juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti: menggunakan data-data pendukung (presensi sekolah, catatan harian, dan lain-lain), melibatkan seluruh sumber daya manusia yang tersedia dalam pelaksanaan program PPK, dan memanfaatkan berbagai media, sarana prasarana, atau berbagai potensi sekolah yang ada dalam penilaian keberhasilan program PPK.

Berbagai hal tersebut dapat dimasukkan kedalam proses pengumpulan data untuk mendukung hasil evaluasi. Hal ini diperlukan untuk melihat secara nyata kondisi/hasil dari berbagai program PPK yang telah dilaksanakan. Dari hasil pengumpulan data kemudian dilakukan proses pengolahan dan penyimpulan. Data yang didapatkan kemudian ditindaklanjuti oleh sekolah untuk memperbaiki pelaksanaan program PPK. Selain itu mekanisme umpan balik juga diperlukan agar apa yang dirasakan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh sekolah dalam penetapan program-program PPK selanjutnya.

Dari berbagai uraian di atas evaluasi program PPK diperlukan untuk mengumpulkan dan mendeskripsikan data-data dalam pelaksanaan program PPK yang nantinya hasil dari evaluasi digunakan untuk menentukan keputusan selanjutnya mengenai program PPK tersebut. Dalam proses evaluasi mempunyai beberapa tahapan yaitu: pembentukan tim evaluasi, merumuskan instrumen penilaian keberhasilan, melakukan

pengambilan data berdasarkan instrumen yang ada, melakukan proses deskripsi, analisis, dan pembahasan data yang didapatkan, kesimpulan hasil, serta tindak lanjut atau follow up oleh sekolah. Evaluasi program PPK berguna untuk memilah berbagai program PPK yang sudah berjalan mana yang sudah atau mempunyai tingkat keberhasilan tinggi ataupun yang masih rendah sehingga hasil ini dapat dijadikan bahan refleksi untuk perencanaan program PPK yang selanjutnya agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## **6. Prinsip-prinsip Pengembangan dan Implementasi Pendidikan Karakter<sup>56</sup>**

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### a. Nilai-nilai Moral Universal

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

### b. Holistik.

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olahraga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler,

---

<sup>56</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Konsep dan Pedoman PPK, hlm. 10-12.

kokurikuler, dan ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan Pendidikan.

c. Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan.

d. Partisipatif

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK.

e. Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

f. Kecakapan

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis (*critical thinking*), berpikir kreatif (*creative thinking*), kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (*collaborative learning*).

g. Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

h. Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

i. Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai

karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnya.

## 7. Basis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter

Gerakan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan mantap dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat/komunitas.<sup>57</sup>

### a. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas

- 1) Mengintegrasikan proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik itu secara tematik maupun terintegrasi dalam mata pelajaran.
- 2) Memperkuat manajemen kelas, pilihan metodologi, dan evaluasi pengajaran.
- 3) Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah.

### b. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah

- 1) Menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah.
- 2) Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan.

---

<sup>57</sup> Albertus, Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. (Yogyakarta: Kanisius, 2015) hlm. 57.

- 3) Melibatkan seluruh ekosistem pendidikan di sekolah.
  - 4) Mengembangkan dan memberi ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
  - 5) Memberdayakan manajemen dan tata kelola sekolah.
  - 6) Mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah.
- c. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat
- 1) Memperkuat peranan Komite Sekolah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan.
  - 2) Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
  - 3) Mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, dan LSM.
  - 4) Mensinkronkan program dan kegiatan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya.

## 8. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter

Karakter Dalam Kerangka Acuan Pendidikan Karakter. Sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Secara lebih khusus pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu:<sup>58</sup>

a. Pembentukan dan Pengembangan

Potensi Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.

b. Perbaikan dan Penguatan

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.

c. Penyaring

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat.

Pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

---

<sup>58</sup> Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Hlm. 5.

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Penguatan pendidikan karakter sebagai sebuah kebijakan dalam bidang pendidikan yang bertugas untuk memperkuat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan generasi yang berkarakter unggul. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional dalam panduan pelaksanaan pendidikan karakter menyatakan bahwa:<sup>59</sup> Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Pendapat Kemendikbud menyatakan bahwa dalam konteks yang lebih luas, penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan.

---

<sup>59</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, *Panduan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan Kemendiknas, hlm. 7.

<sup>60</sup> Kemendikbud, 2016, *Konsep Dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, hlm. 16.

- b. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21.
- c. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik).
- d. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter.
- e. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah.
- f. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan PPK adalah:<sup>61</sup>

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan,
- b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan

---

<sup>61</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pasal 2.

pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, dan

- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penguatan pendidikan karakter memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku peserta didik. Penguatan dan pengembangan tujuan pendidikan karakter memiliki makna bahwa pendidikan bukan hanya sekedar intelektualitas namun juga meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama. Oleh karena itu, tujuan penguatan pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku peserta didik yang negatif menjadi positif. Penguatan pendidikan karakter mempunyai tujuan akhir bagaimana peserta didik dapat berperilaku sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mampu membangun dan menanggapi berbagai tantangan yang ada di masa depan.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, hlm 5-6.

- a. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan.
- b. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21.
- c. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik).
- d. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter.
- e. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber belajar di dalam dan di luar sekolah.
- f. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu.<sup>63</sup> Namun, pada kenyataannya banyak para peserta didik yang mulai kehilangan nilai-nilai moral mereka, dengan begitu tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai apabila tidak ada tindak lanjut mengenai masalah penanaman pendidikan karakter. Maka dari itu

---

<sup>63</sup> Barnawi dan M. Arifin. *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) hlm.42.

peran guru sangat vital sebagai sosok yang diidolakan, serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi peserta didiknya.

Prasyarat : a). Tersedianya pembelajaran yang berorientasi kepada penanaman nilai-nilai moral b). Kurikulum yang sesuai c). Guru dapat memberi contoh perwujudan dalam berkepribadian dan berperilaku, dapat menjalankan lima peran sebagai konservator (pemelihara), inovator (pengembang), transmiter (penerus), transformator (penerjemah), organisator (penyelenggara).<sup>64</sup>

Kenyataannya: a). Pembelajaran saat ini dianggap terlalu membosankan dan hanya berfokus kepada banyak teori saja meskipun telah diterapkan kurikulum 2013 b). Pada kenyataannya kurikulum yang diterapkan saat ini masih banyak kritikan dari berbagai belahan masyarakat, dikarenakan perubahan kurikulum ini terkesan tergesa-gesa dan guru juga belum sepenuhnya mengerti dan memahami akan sistematika dan aturan2 dari kurikulum tersebut c). Guru sebagai contoh para peserta didik dalam bertingkah laku, namun banyak guru sekarang yang rendah moral dan etikanya dalam berperilaku dihadapan peserta didik, guru juga banyak yang belum menguasai materi, dan juga belum dapat melaksanakan kelima peran sebagai guru yang sebenarnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan sebuah rancangan alternatif untuk memecah permasalahan pemerataan pendidikan. Dari sini analisis akan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 99.

menyusun atau merumuskan sebuah rancangan alternatif untuk pemenuhan penguatan pendidikan karakter.

### **C. Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) di Sekolah/Madrasah**

#### **1. Pengintegrasian PPK dalam kurikulum**

Langkah-langkah menerapkan PPK melalui pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum, dapat dilaksanakan dengan cara:<sup>65</sup>

- a. melakukan analisis KD melalui identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran;
- b. mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan memilih metode pembelajaran dan pengelolaan (manajemen) kelas yang relevan;
- c. melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP;
- d. melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang dilakukan; dan
- e. melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pembelajaran.

#### **2. Penguatan Pendidikan Karakter melalui Manajemen Kelas**

Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah momen pendidikan yang menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki

---

<sup>65</sup> Kemendikbud, *Konsep dan Pedoman, Penguatan Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Kemendikbud, 2017), hlm. 61.

otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas kelas membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil. Pendidik memiliki kewenangan dalam mempersiapkan (sebelum masuk kelas), mengajar, dan setelah pengajaran, dengan mempersiapkan skenario pembelajaran yang berfokus pada nilai-nilai utama karakter. Manajemen kelas yang baik akan membantu peserta didik belajar dengan lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar.<sup>66</sup>

### 3. PPK Melalui Pilihan dan Penggunaan Metode Pembelajaran

Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih guru secara kontekstual, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Metode pembelajaran saintifik (*scientific learning*), sebagai metode pembelajaran yang didasarkan pada proses keilmuan dengan langkah kegiatan mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan.
- b. Metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan pada identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, kontekstual, berbentuk masalah yang strukturnya tidak jelas atau belum jelas solusinya (*ill-structured*) atau *open ended* yang ada dalam kehidupan peserta didik sebagai titik sentral kajian untuk dipecahkan melalui prosedur ilmiah dalam

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 68-68.

pembelajaran, yang kegiatannya biasanya dilaksanakan secara berkelompok.

- c. Metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata.
- d. Metode pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*), yaitu suatu model pembelajaran dimana peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil (umumnya terdiri dari 4-5 orang peserta didik dengan keanggotaan yang heterogen (tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan suku/ras berbeda). Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran.
- e. Metode pembelajaran berbasis teks yaitu pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan peserta didik untuk menyusun teks. Metode pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis terhadap fitur-fiturnya secara eksplisit serta fokus pada hubungan antara teks dan konteks penggunaannya. Perancangan unit-unit pembelajarannya mengarahkan peserta didik agar mampu memahami dan memproduksi teks baik lisan maupun tulisan dalam

berbagai konteks. Untuk itu, siswa perlu memahami fungsi sosial, struktur, dan fitur kebahasaan teks.

#### **4. PPK Melalui Mata Pelajaran Khusus**

Penguatan Pendidikan Karakter secara umum dilakukan dengan cara mengintegrasikan PPK dalam mata pelajaran yang sudah ada (terintegrasi dalam kurikulum). Namun, sekolah bisa pula mengajarkan nilai-nilai PPK melalui mata pelajaran khusus yang berfokus pada tema nilai-nilai tertentu. Sekolah mendesain mata pelajaran khusus dengan alokasi waktu khusus yang disediakan sebagai bagian dalam pembentukan karakter peserta didik.

Tema-tema yang mengandung nilai utama PPK diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas dengan metode pembelajaran yang selaras sehingga dapat semakin memperkaya praksis PPK di sekolah. Tema-tema yang diambil disesuaikan dengan visi dan misi sekolah. Satuan pendidikan mendesain sendiri tema dan prioritas nilai pendidikan karakter apa yang akan mereka tekankan dan menyediakan guru khusus atau memberdayakan guru yang ada untuk mengajarkan materi tentang nilai-nilai tertentu untuk memperkuat pendidikan karakter.

#### **5. PPK Melalui Gerakan literasi**

Gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan cerdas berlandaskan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara untuk menumbuhkembangkan karakter seseorang menjadi

tangguh, kuat, dan baik. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan terprogram sedemikian rupa, baik dalam kegiatan-kegiatan berbasis kelas maupun kegiatan-kegiatan berbasis budaya sekolah, dan komunitas masyarakat. Dalam konteks kegiatan PPK berbasis kelas, kegiatan-kegiatan literasi dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum.<sup>68</sup>

Setiap guru dapat mengajak peserta didik membaca, menulis, menyimak, dan mengomunikasikan secara teliti, cermat, dan tepat tentang suatu tema atau topik yang ada di berbagai sumber, baik buku, surat kabar, media sosial, maupun media-media lain. Dalam hubungan ini diperlukan ketersediaan sumber-sumber informasi di sekolah, antara lain buku, surat kabar, dan internet. Oleh sebab itu, keberadaan dan peranan pojok baca, perpustakaan sekolah, dan jaringan internet menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.

Kreativitas guru merupakan faktor penting dalam menyajikan program dan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara cerdas, agar peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Pembiasaan membaca buku non-pelajaran selama lima belas menit sebelum pelajaran dimulai, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

---

<sup>68</sup> Kemendiknas. Panduan Pendidikan Karakter. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan Kemendiknas, 2011. hlm. 11.

perlu menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan dan memulai gerakan literasi di sekolah.<sup>69</sup>

## **6. PPK Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling**

Penguatan Pendidikan Karakter bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling. Peranan guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam pengembangan ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar/ akademik, karier, pribadi, dan sosial. Bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan secara kolaboratif dengan para guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, maupun orang tua dan pemangku kepentingan lainnya.

## **7. Strategi Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) di Sekolah/Madrasah**

Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai berikut :<sup>70</sup>

- a. penyusunan perangkat kebijakan;
- b. penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan;
- c. pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
- d. pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan; dan
- e. sosialisasi.

---

<sup>69</sup> Kemendiknas. Panduan Pendidikan Karakter. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan Kemendiknas, 2011. hlm. 12.

<sup>70</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan karakter, hlm. 13-14.

Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar. Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Penyiapan perangkat dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan kegiatan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. penyiapan sumber daya manusia pada tingkat Satuan Pendidikan;
- b. pemetaan kesiapan pendidikan karakter pada tingkat Satuan Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap Satuan Pendidikan;
- d. penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/ materi pelatihan untuk pelaksanaan pendidikan karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; dan
- e. pembiasaan pelaksanaan pendidikan karakter pada setiap satuan pendidikan. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan karakter, hlm. 15-17.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 19.

### BAB III

#### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara umum bahwa lokasi MI Ma'arif Sendang sebagai salah satu lembaga pendidikan sekolah dasar Islam di lereng bukit Menoreh bagian selatan satu-satunya MI di kecamatan Pengasih yang memiliki visi: “Terwujudnya peserta didik yang beriman, mandiri, berprestasi, berbudaya, dan berakhlakul karimah, serta berwawasan global.<sup>1</sup>”

Kasmad Rifangi, selaku kepala MI Ma'arif Sendang menyatakan bahwa krisis moral dan akhlak serta krisis multidimensi yang terjadi dan melanda bangsa Indonesia terutama lemahnya moral generasinya, menjadi masalah satu faktor yang mendorong penanaman kecerdasan emosional dan spiritual pada peserta didiknya. Selain itu tingkat keimanan dan pengetahuan agama orang tua peserta didik yang masih rendah juga menjadi faktor yang melatarbelakangi adanya penanaman kecerdasan tersebut. Dengan rendahnya tingkat keagamaan orang tua siswa menyebabkan mayoritas anak-anak tidak mendapatkan pendidikan agama secara maksimal di rumah sehingga hal tersebut menjadi tugas madrasah untuk memberikan pendidikan agama kepada siswanya secara maksimal.

Salah satu faktor yang menjadi latar belakang penyusunan program kebijakan penguatan pendidikan karakter (PPK) adalah mayoritas orang tua atau wali murid dari kalangan orang sibuk bekerja dan merasa tidak mempunyai waktu untuk mendidik agama secara maksimal saat di rumah, sehingga orang tua

---

<sup>1</sup> Kurikulum MI Ma'arif Sendang, tahun pelajaran 2018/2019, hal. 22

mempunyai inisiatif untuk memadrasahkan putra/putrinya di MI Ma'arif Sendang yang dianggap mampu dan berkualitas dalam mendidiknya. Maka dari hal tersebut, Pihak MI Ma'arif Sendang mencoba menawarkan solusi yakni pendidikan yang mencakup penguatan pendidikan karakter.<sup>2</sup>

Menurut Kasmad Rifangi, krisis budaya dan moral yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah merebak dan sangat merusak jiwa dan pikiran anak, hal ini sangat memprihatinkan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dan wajib dibekali keagamaan yang kuat, apa yang akan terjadi jika pemimpin bangsa ini kelak tidak memiliki keimanan, ketaqwaan, serta akhlak yang mulia. Maka dari itu, MI Ma'arif Sendang terus berupaya untuk mendidik peserta didiknya agar menjadi pribadi yang tangguh, yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang nantinya akan bekal kehidupannya kelak ketika dewasa nanti.<sup>3</sup>

Program pendidikan karakter yang diterapkan oleh MI Ma'arif Sendang yang dikembangkan meliputi: Budaya moral spiritual, bersih rapi, cinta tanah air, setiakawanan sosial, belajar bersama, kerja keras, dan giat prestasi. Tujuan umum yang diterapkan dalam pendidikan karakter di madrasah tersebut antara lain:<sup>4</sup> 1). Menyiapkan insan berkarakter yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi sosok teladan, rela berkorban, kreatif, inovatif, dan profesional. 2). Mewujudkan

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Kasmad Rifangi, Kepala MI Ma'arif Sendang, pada tanggal 10 Oktober 2018.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Kasmad Rifangi, Kepala MI Ma'arif Sendang, pada tanggal 10 Oktober 2018

<sup>4</sup> Program budaya sekolah TP. 2017/2018 MI Ma'arif Sendang Kulon Progo

sinergitas satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat yang religius, berbudaya, edukatif, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi penegakan hukum. 3). Menfasilitasi pembentukan insan pelestari nilai-nilai budaya dan sekaligus mampu memperbaharui aktualitasnya.

Sebelum membahas tentang kesiapan pihak MI Ma'arif Sendang dalam menyusun program kebijakan penguatan pendidikan karakter (PPK) dalam bab ini, penulis akan membuat dan menyusun dalam bentuk *flowchart* atau bagan, untuk mempermudah dalam mengidentifikasinya, berikut gambaran tentang alur penyusunan program kebijakannya:





Gambar 3.1: Bagan Penyusunan Kebijakan Program PPK

## **A. Gambaran Umum MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

### **1. Seting Alasan Penelitian di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan:

- a. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo merupakan MI sebagai rujukan
- b. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo memiliki status akreditasi A.<sup>5</sup>
- c. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo memiliki letak yang strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
- d. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo merupakan madrasah rintisan unggulan yang telah meraih berbagai prestasi baik tingkat lokal dan nasional.
- e. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo sudah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu Madrasah sejak tahun 2015.
- f. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo sekolah/madrasah tingkat dasar Islam sebagai dasar dalam menanamkan pendidikan karakter anak bangsa.
- g. MI Ma'arif Sendang Kulon Progo telah menyusun dan melaksanakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

### **2. Visi Misi dan Tujuan MI MA'arif Sendang Kulon Progo**

Dasar dalam menjalankan pembelajarannya setiap hari Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sendang Kulon Progo mengacu pada:

Visi MI. Ma'arif Sendang Kulon Progo

---

<sup>5</sup> Dokumen, Piagam Akreditasi MI Ma'arif Sendang Kulon Progo Tahun 2016-2021, Hasil Observasi, 24 September 2018

Terwujudnya peserta didik yang beriman, mandiri, berprestasi, dan berakhlakul karimah, serta berwawasan global.<sup>6</sup>

Indikator Visi :

- a. Menjalankan shalat lima waktu dan dapat mengaji
- b. Berperilaku sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- c. Berpikir aktif, kreatif dan tanggap dalam memecahkan masalah
- d. Menanamkan nilai-nilai kemandirian siswa
- e. Menjadi juara dalam setiap kompetisi

Misi MI. Ma'arif Sendang

- a. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir aktif, kreatif, inovatif, dan terampil dalam memecahkan masalah.
- b. Meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik.
- c. Meningkatkan dan menyediakan sarana prasarana pembelajaran
- d. Menumbuhkan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan terhadap Al Qur'an dan Hadits agar menjadi insan yang berakhlakul karimah, sopan dalam berbicara dan santun dalam bertindak.
- e. Menerapkan pembelajaran berbasis IT
- f. Penerapan pembelajaran di alam bebas

---

<sup>6</sup> Dokumen Kurikulum MI Ma'arif Sendang TP. 2018/2019, Hasil Observasi, 24 September 2018

- g. Mengembangkan budaya Nusantara
- h. Mengembangkan potensi peserta didik melalui ekstrakurikuler dan bimbingan konseling.
- i. Mengembangkan hasil karya guru dan siswa melalui publikasi ilmiah dan Media.
- j. Mewujudkan budaya budi pekerti dalam rangka pembentukan siswa yang berkarakter Islam.
- k. Menerapkan Pembelajaran berbasis masyarakat, sosial, dan keagamaan
- l. Melaksanakan dan menerapkan penilaian yang otentik.

#### Tujuan MI. Ma'arif Sendang

Menunjuk pada tujuan pendidikan dasar, maka pada lima tahun terakhir MI Ma'arif Sendang Kulon Progo mempunyai tujuan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Terwujudnya warga madrasah yang memiliki budaya disiplin dan agamis
- b. Terlaksananya pembelajaran yang PAKEM.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan mendekati SNP
- d. Terwujudnya Warga sekolah memiliki perilaku 7 K

---

<sup>7</sup> Dokumen Kurikulum MI Ma'arif Sendang Kulon Progo TP. 2018/2019, Hasil Observasi, 24 September 2018

- e. Terwujudnya peningkatan jumlah siswa yang masuk madrasah ini
- f. Terwujudnya kepercayaan masyarakat akan kemampuan madrasah ini
- g. Rencana lima tahun yang akan datang mempertahankan dan meningkatkan nilai rata-rata US/M Tahun pelajaran 2015/2016 dari 8.54 menjadi :
  - 1) Tahun Pelajaran 2016/2017 mencapai 8.54
  - 2) Tahun Pelajaran 2017/2018 mencapai 8.54
  - 3) Tahun Pelajaran 2018/2019 mencapai 8.56
  - 4) Tahun Pelajaran 2019/2020 mencapai 8.58
  - 5) Tahun Pelajaran 2020/2021 mencapai 8.60
- h. Tercapainya dan atau mempertahankan pada peringkat 5 besar di tingkat kecamatan pada mata pelajaran yang di-UASBN/UNAS-kan
- i. Terwujudnya peningkatan jumlah siswa yang diterima di SMP Faforit sekurang-kurangnya 50% dari yang mendaftar
- j. Terwujudnya kedisiplinan dari seluruh komponen sekolah (stakeholders) untuk membentuk kepribadian yang tangguh dan kokoh sebagai dasar dalam setiap aktivitas serta sebagai aset sekolah
- k. terwujudnya pembinaan guru yang profesional
- l. terwujudnya pembelajaran yang kontekstual.
- m. Terwujudnya peningkatan aktivitas dan kreativitas siswa melalui pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikulum
- n. Terwujudnya budaya daerah melalui MULOK bahasa daerah setempat.

- o. Tercapainya 75% siswa mampu membaca dan menghayati kitab suci
- p. Terwujudnya kerja sama dengan komite, masyarakat, dan wali murid dengan baik.
- q. terwujudnya Menejemen Berbasis Madrasah MBM

### 3. Indikator Keberhasilan MI Ma'arif Sendang Kulon Progo

MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam menempuh keberhasilan visi, misi serta tujuan pendidikan memiliki indikator keberhasilan untuk melihat ketercapaian visi, misi dan tujuan pendidikan yang telah dibuat, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Meningkatnya rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional
- b. Meningkatnya jumlah siswa yang diterima di SMP/MTs favorit
- c. Memiliki jiwa untuk melaksanakan 9 K, mandiri, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan hidup
- d. Meraih kejuaraan berbagai bidang baik akademik maupun nonakademik dalam berbagai lomba/olimpiade di tingkat regional dan nasional.
- e. Memiliki sikap profesional dengan kemampuan melakukan penelitian/*research*, peduli lingkungan hidup pada seluruh warga madrasah
- f. Budaya dan karakter bangsa Indonesia diamalkan oleh warga madrasah
- g. Jalinan kerja sama yang saling bermanfaat
- h. Meningkatnya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif

---

<sup>8</sup> Dokumen Kurikulum MI Ma'arif Sendang TP. 2018/2019, Hasil Observasi, 24 September 2018

dan menyenangkan.

#### 4. Data Guru dan Peserta Didik MI Ma'arif Sendang Kulon Progo

Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan MI. Ma'arif Sendang Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

Tabel 3.2  
Data Guru MI Ma'arif Sendang

No	Nama Guru/Karyawan	Status	Tugas Mengajar	Pendidikan Terakhir
1.	Kasmad Rifangi	PNS	Kepala Madrasah	S2 PGMI
2.	Sukirman, S.Pd.I	PNS	KL. VI	S1 PAI
3.	Siswadi, S. Pd.	PNS	KL. V	S 1 PGSD
4.	Arif Kurniawan, S.Pd.I.	GTY	KL. IV	S 1 PGMI
5.	Hanik Mardiyatin, S. Ag.	PNS	KL. III	S1 PAI
6.	Siti Fatimah, S.Pd.I	GTY	KL. II	S 1 PGMI
7.	Jumiyati, S. Pd. I.	PNS	KL. I	S 1 PAI
8.	Sholihatun Badriyah, S.Pd.	GTT	PAI dan Mulok	S1 BK
9.	Nurul Kholida, S.Pd.	GTT	PAI dan B. Arab	S1 PAI
10.	Maharani Cintia Desi, S.Pd.	GTT	Penjas	S1 Penjas

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah di masa depan agar memiliki kualifikasi akademik (S1) dan

<sup>9</sup> Dokumen Data GTK MI Ma'arif Sendang Kulon Progo TP. 2018/2019, Hasil Observasi, 24 September 2018

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>10</sup>



Gambar: 3.3  
Dewan Guru dan PTK MI Ma'arif Sendang

Tabel 3.4

Data Perkembangan Jumlah Peserta Didik MI Ma'arif Sendang Kulon Progo selama 3 tahun

No.	Tahun	Kelas						JML
		I	II	III	IV	V	VI	
1	2016/2017	27	19	10	16	11	11	95
2	2017/2018	25	25	20	10	16	11	107
3	2018/2019	16	24	25	21	12	15	113

Sebagaimana sekolah atau madrasah lainnya peserta didik merupakan bagian integrasi yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan madrasah, karena peserta didik merupakan subjek sekaligus

<sup>10</sup> Standar pendidik dan tenaga kependidikan (Permendikbud Noomor. 16 Tahun 2007).

objek yang mendalami ilmu-ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan kelak.

Sebelum tahun 2005 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sendang Kulon Progo peserta didik hanya 21 siswa, tetapi setelah mengadakan perubahan system peserta didik semakin bertambah dan bergantinya tenaga-tenaga guru yang muda. Dan saat ini MI Ma'arif Sendang memiliki 113 peserta didik dari kelas I sampai dengan kelas VI. Berikut tabel kondisi dan perkembangan peserta didik MI Ma'arif Sendang Kulon Progo Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2018/2019.<sup>11</sup> Siswa yang masih relatif sedikit, dalam membentuk dan pengawasan pada kegiatan pembiasaan lebih mudah terkontrol dan mudah diawasi dalam rangka membentuk karakter peserta didik.

##### **5. Sarana dan Prasarana MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap warga sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah maka didukung dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai, sebagai berikut: MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam mewujudkan visi madrasah adalah dengan memperlengkapi beberapa sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan seluruh warga madrasah. Maka berikut ini adalah data sarana yang dimiliki oleh MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Kasmad Rifangi, Kepala MI Ma'arif Sendang Kulon Progo, 24 September 2018.

mengoptimalkan pelayanan terhadap warga sekolah serta untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa.

Tabel 3.5  
Data Sarana MI Ma'arif Sendang Kulon Progo<sup>12</sup>

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kelas Belajar	6	1 Ruang kelas menjadi 2 rombel
2.	Ruang Kepala dan Guru	1	Baik
3.	Ruang Tamu	ada	Di kantor
4.	Kamar Mandi	3	Baik
5.	Ruang Perpustakaan	1	Baik
6.	Ruang Komputer	-	Tidak Ada
7.	Tempat Parkir	1	Sedang
8.	Lapangan Olahraga	1	Baik
9.	Ruang UKS	1	Baik
10.	Dapur	1	Sedang
11.	Taman Depan Ruang Guru	1	Baik
12.	Taman Sekolah	1	Baik
13.	Taman bermain	-	Tidak ada
14.	Mushola	1	Baik

1. Fasilitas /peralatan yang di miliki<sup>13</sup>

- a. Komputer/Leptop 2 unit
- b. LCD Proyektor 1 unit
- c. Kamera Digital
- d. VCD Pembelajaran MIPA
- e. Mesin ketik
- f. Printer
- g. Alat-alat Olahraga
- h. Alat-alat kebersihan
- i. Buku-buku

<sup>12</sup> Dokumen Sarana dan Prasarana MI Ma'arif Sendang TP. 2018/2019, Hasil Observasi, 24 September 2018

<sup>13</sup> Dokumen Sarana dan Prasarana MI Ma'arif Sendang, Hasil Observasi, 24 September 2018

- j. Peralatan ibadah
- k. Peralatan Sound System

Fasilitas pendukung yang dimiliki Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Sendang Kulon Progo ini keberadaannya sudah baik dan didukung dengan kreativitas dari para guru, jadi untuk pembelajaran di madrasah ini sudah cukup baik dan sederhana sekali untuk pembelajaran Qur'an Hadits. Peserta didik dapat merasakan leluasa untuk melakukan baca mandiri buku perpustakaan walaupun belum ada tempat khusus baca, peserta didik membaca di halaman depan kelas yang sudah dipersiapkan oleh para guru, dengan berbagai macam tersedianya buku yang baru yang telah disediakan. Peserta didik juga dapat bermain, belajar dan berolahraga di halaman sekolah yang cukup luas dari kapasitas peserta didik yang ada dan cukup representative serta aman. Di samping itu guru banyak membuat media sendiri dan leluasa dalam menggunakan media pembelajaran yang tersedia seperti komputer, LCD Proyektor, buku-buku guna mendukung proses pembelajaran yang berlangsung.

#### **6. Kemitraan MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, maka madrasah membangun beberapa jaringan kerja sama atau kemitraan sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dokumen Program Budaya Mutu Akademik MI Ma'arif Sendang, Hasil Observasi, 24 September 2018

- a. Kerja sama dengan Orang tua: Kerja sama dengan Orang tua peserta didik dilaksanakan melalui Komite Sekolah. Ada 5 peran orang tua dalam pengembangan sekolah, yaitu sebagai donatur dalam menunjang kegiatan dan sarana madrasah, namun belum berjalan optimal mengingat kondisi ekonomi.
  - b. Mitra sekolah dalam pembinaan pendidikan: Mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik, mitra dialog dalam peningkatan kualitas pendidikan dan sumber belajar.
  - c. Alumni, merupakan organisasi informal yang memberikan sumbangan terhadap kemajuan sekolah baik dalam bentuk material maupun nonmaterial untuk ikut serta meningkatkan kualitas pendidikan di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo.
  - d. Bank Pasar Kulon Progo sebagai sarana menabung siswa, LKM Desa Karang Sari sebagai sarana menabung siswa, dan Bank Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan madrasah.
  - e. Lembaga Bimbingan Belajar, untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan kompetensi hasil pembelajaran.
  - f. Media massa, baik elektronik maupun cetak untuk mempublikasikan kegiatan maupun prestasi MI Ma'arif Sendang Kulon Progo.
  - g. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kulon Progo dalam pengelolaan limbah sekolah.
-

- h. Kerja sama dengan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kulon Progo sebagai sarana sumber ilmu.
- i. Kerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Pengasih sarana usaha kesehatan sekolah/madrasah yang efektif.

Dapat disimpulkan bahwa profil MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam menerapkan penguatan pendidikan karakter sudah didukung oleh berbagai aspek yang ada di madrasah tersebut. Dari 8 standar pendidikan nasional yang ada di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo secara proporsional standar pelayanan minimal terpenuhi dan juga mendapatkan predikat akreditasi A (dengan nilai 88).

#### **7. Program Meningkatkan Mutu Akademik di MI Ma'arif Sendang**

Pencapaian yang diharapkan dari implementasi RKJM dan RKM MI Ma'arif Sendang Kulon Progo Tahun Pelajaran 2015-2019 adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pengembangan kompetensi lulusan: KKM setiap mata pelajaran minimal 70; target nilai US/M Bahasa Indonesia 8,36; Matematika 8,35; IPA 9,00, dengan rata-rata: 8,58; menduduki peringkat ke 1 nilai US/M untuk tingkat MI se Kabupaten Kulon Progo dan 3 besar di tingkat kecamatan.

---

<sup>15</sup> Dokumen Program Budaya Mutu Akademik MI Ma'arif Sendang, Hasil Observasi, 24 September 2018

- b. Pengembangan kurikulum: Madrasah mengembangkan KTSP (K13) menggunakan panduan yang disusun BSNP. Semua guru menyusun program pengayaan bagi peserta didik.
- c. Pengembangan pembelajaran: Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Madrasah melaksanakan supervisi dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional
- d. Pengembangan sistem penilaian: Guru menyusun perencanaan penilaian, menyampaikan kriteria penilaian kepada peserta didik. Guru menerapkan berbagai teknik, bentuk, dan jenis penilaian berdasar rencana yang telah dibuat untuk mengukur prestasi dan kesulitan belajar peserta didik. Guru menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran
- e. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan: Madrasah meroling guru kelas, mengadakan guru PAI dan Tahfid. Madrasah meningkatkan keefektifan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mengadakan tenaga administrasi.
- f. Pengembangan sarana dan prasarana madrasah: Madrasah menambah 2 RKB, 2 Ruang Jamban, membangun ruang sirkulasi 40 m<sup>2</sup>, menambah 107 eksemplar buku tematik dan CD pembelajaran sesuai SNP. Pemeliharaan bangunan dilaksanakan secara berkala sesuai SNP, dan meningkatkan kenyamanan ruang kelas, ruang tamu, ruang guru.

- g. Pengembangan manajemen madrasah: Visi-misi madrasah tersosialisasikan ke semua pemangku kepentingan. Pengelolaan madrasah didasarkan pada RKT dan RKJM, yang menunjukkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Madrasah melakukan EDM secara berkelanjutan. Perumusan RAPBM dengan melibatkan komite madrasah dan pemangku kepentingan. Madrasah mencari dana dengan inisiatif sendiri, membangun kerja sama dengan Dunia Usaha dan Industri. Madrasah membentuk ikatan alumni.
- h. Pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler: Madrasah menyelenggarakan 6 macam ekstrakurikuler (akademik dan non-akademik), dengan target prestasi yang terukur.
- i. Budaya dan lingkungan madrasah: Madrasah mengembangkan kepribadian dan keterampilan hidup peserta didik.
- j. Penanaman karakter (budi pekerti): Madrasah mengembangkan nilai-nilai agama, budaya, dan pemahaman atas sikap yang dapat diterima.
- k. Pengembangan Madrasah Unggul: Madrasah menyelenggarakan *Full Day School* Program.

## **B. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Sebelum adanya Perbub Nomor 65**

### **Tahun 2017**

Sebelum adanya peraturan pemerintah terkait kebijakan penguatan

pendidikan karakter, MI Ma'arif Sendang Kulon Progo sudah sangat lama melaksanakan pendidikan karakter. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kasmad Rifangi, selaku Kepala MI Ma'arif Sendang Kulon Progo yang menyatakan, bahwa: <sup>16</sup>

*“sudah, ya sudah sejak beberapa tahun sudah lama”. Lebih lanjut disampaikan bahwa: “Kalau pendidikan karakter itu pendidikan bagaimana pun juga, dan ada regulasi atau tidak diarahkan ke pendidikan karakter, ada arah untuk menuju ke tujuan pendidikan kemudian diperkuat dengan regulasi yang ada sekarang itu”.*

Senada dengan pernyataan tersebut Arif Kurniawan, sebagai guru honorer kelas IV yang telah lama mengajar di MI Ma'arif Sendang sejak tahun 2005 menyatakan, bahwa: <sup>17</sup>

*“Sebenarnya pendidikan karakter itu diajarkan terus yang tidak cuma waktu sekarang sesudah ada regulasi, mungkin hanya beda namanya tetapi pada dasarnya sama yaitu mencapai tujuan pendidikan nasional, yang dulu kemungkinan belum terprogram dan tercatat, tetapi pada intinya pendidikan karakter sudah lama ada, bahkan semenjak berdirinya lembaga pendidikan ini”.*

Berdasarkan pernyataan responden di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter sudah lama ada di dalam proses pendidikan di sekolah-sekolah termasuk di MI Ma'arif Sendang. Tujuan dari pendidikan serta seorang pendidik sendiri adalah untuk membentuk dan mendidik siswa agar lebih baik lagi. Sebelum adanya kebijakan pendidikan karakter, sudah sejak lama guru dalam setiap mata pelajarannya menyisipkan beberapa nilai-nilai karakter

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kasmad Rifangi selaku Kepala MI Ma'arif Sendang, pada Senin, 20 Agustus 2018

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Arif Kurniawan Guru Kelas IV MI Ma'arif Sendang, pada Senin, 20 Agustus 2018

dalam proses belajar mengajarnya.

Pendidikan karakter di di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo pada setiap tahunnya mengalami perkembangan dan dampak yang baik bagi warga madrasah. Awalnya pemberlakuan beberapa peraturan yang ada di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo tidak dijalankan dengan tegas dan beberapa kegiatan pengembangan diri siswa tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh karena programnya juga belum jelas. Sehingga sejak tahun 2015 dengan dibuatnya program strategi mutu sampai dengan sekarang, warga di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo mengalami kenaikan dalam hal kedisiplinan dan tanggungjawab, giat prestasi. Kepala MI Ma'arif Sendang Kulon Progo juga menyatakan bahwa dari dulu madrasah ini (MI Ma'arif Sedang) sudah mencoba beberapa kebijakan-kebijakan seperti meningkatkan mutu lulusan, budaya keagamaan dan tim giat prestasi, hal ini dilakukan untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat yang ditunjukkan melalui beberapa kejadian seperti prestasi tidak baik, lulusannya belum bisa membaca Al Qur'an, dan siswanya nakal-nakal. Sehingga pihak madrasah harus bangkit dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang strategis untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Berikut pernyataan Bapak Kasmad Rifangi, bahwa:<sup>18</sup>

*“Dulu sebelum tahun 2016, saya mencari murid dari pintu ke pintu, dan soan ke para tokoh masyarakat, untuk meminta anaknya sekolah di MI Ma'arif Sendang. Sambal menyakinkan masyarakat dengan cara*

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kasmad Rifangi Selaku Kepala MI Ma'arif Sendang, pada Senin, 20 Agustus 2018

*membuat janji-janji strategis, akhirnya jannji juga terlaksana dengan baik, yakni meningkatnya prestasi siswa, dan Alhamdulillah 2 tahun ini madrasah ini tiap kali PPDB sudah penuh duluan. Ini artinya bahwa program/jannji madrasah untuk giat prestasi berhasil dilaksanakan”.*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa MI Ma'arif Sendang Kulon Progo memang sudah lama mengupayakan pendidikan karakter walaupun namanya bukan program pendidikan karakter tetapi pada tujuan akhirnya sama. Terutama tujuannnya untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat yang hampir punah yaitu permasalahan lulusan MI Ma'arif Sendang Kulon Progo tidak bermutu. Kemudian semakin bertambahnya tahun beberapa kebijakan yang dibuat oleh MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dengan menanamkan nilai karakter tersebut telah menunjukkan hasil secara signifikan. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan mendapat perhatian khusus dan ketegasan dari pihak madrasah yakni dengan memberikan apresiasi kepada siswa yang berprestasi. Memang tidak mudah melainkan dibutuhkan kedisiplinan yang kuat, ketegasan serta waktu yang lama atau pembiasaan bagi warga madrasah, terutama semangat guru yang menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat.

### **C. Perencanaan Menyusun Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

Pada variabel perencanaan kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), angket yang digunakan berisi 17 butir pertanyaan yang

meliputi (1) Tim Pengembang Program PPK 1 butir, (2) Proses Penyusunan Program PPK 12 butir, (3) Pengelolaan Anggaran Program PPK 1 butir, (4) Pengelolaan Waktu Program PPK 1 butir, (5) Indikator dan Daya Dukung 2 butir. Hasil perhitungan indikator perencanaan program PPK sebagai berikut.

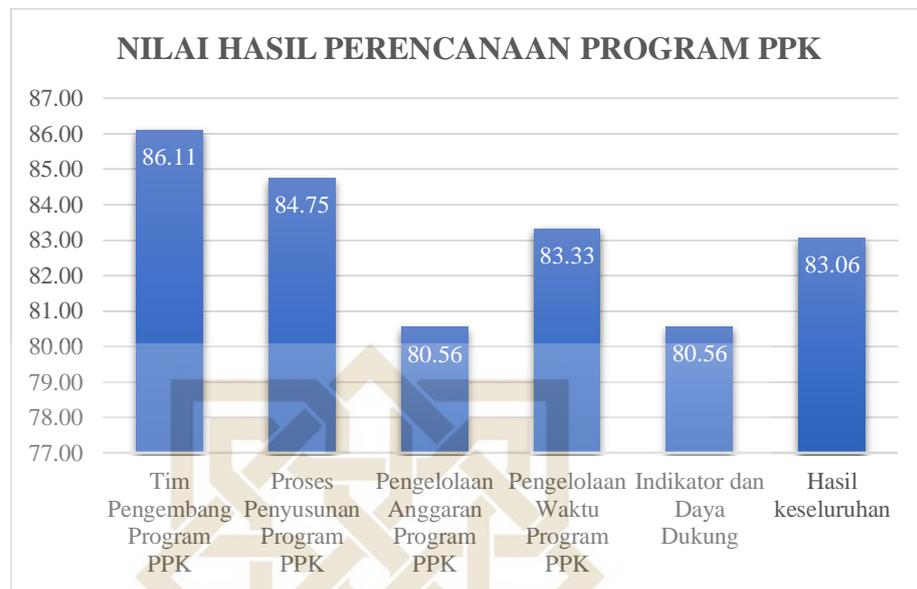
Tabel 3.6  
Hasil Penelitian Perencanaan Program PPK<sup>19</sup>

No.	Indikator	Prosentase	Keterangan
1.	Tim Pengembang Program PPK	86,11	Sangat Baik
2.	Proses Penyusunan Program PPK	84,75	Sangat Baik
3.	Pengelolaan Anggaran Program PPK	80,56	Baik
4.	Pengelolaan Waktu Program PPK	83,33	Sangat Baik
5.	Indikator dan Daya Dukung	80,56	Baik
	Hasil keseluruhan	83,06	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 3.4, dapat diketahui bahwa perencanaan penyusunan kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo telah dilaksanakan dengan sangat baik. Perencanaan program Penguatan Pendidikan Karakter mencapai 83.06% yang terdiri dari tim pengembang program PPK 86,11%, proses penyusunan program PPK 84.75%, pengelolaan anggaran program PPK 80.56%, pengelolaan waktu program PPK 83.33%, dan indikator dan daya dukung 80.56%.

Berdasarkan data hasil penelitian dari angket perencanaan kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut:

<sup>19</sup> Hasil Penilaian melalui Angket kepada 9 Guru MI Ma'arif Sendang, Observasi Penyebaran Angket pada Senin, 20 Agustus 2018



Gambar 3.7  
Penilaian Hasil Perencanaan Progam PPK

Dari gambar 3.5, dapat diketahui bahwa indikator dalam perencanaan kebijakan program pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo mempunyai pencapaian yang sangat baik. Namun pencapaian tiap indikator kurang merata. Pencapaian indikator tertinggi didapat dari proses penyusunan program PPK, kemudian tim pengembang dan pengelolaan waktu program PPK, indikator dan daya dukung, dan yang terakhir pengelolaan anggaran program PPK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, maka proses perencanaan program wajib dilaksanakan.<sup>20</sup> Menurut Kementerian Pendidikan Nasional bahwa program

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan SD/MI

pendidikan karakter secara dokumen terintegrasi ke dalam kurikulum pada satuan pendidikan mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Proses perencanaan program sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan program sekolah sehingga program dapat berjalan sesuai harapan dan keinginan.

Berdasarkan data hasil penelitian, perencanaan kebijakan program penguatan pendidikan karakter (PPK) telah dilaksanakan dengan sangat baik. Data perencanaan program PPK di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo mencapai 83.06% dengan sebaran data yaitu tim pengembang program PPK 86.11%.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala madrasah beserta angket terbuka diperoleh informasi bahwa madrasah telah melaksanakan perencanaan kebijakan program PPK. Perencanaan program PPK dilaksanakan setiap awal tahun pembelajaran. Proses perencanaan program PPK diawali dengan pembentukan tim pengembang. Setelah terbentuk maka dilakukan identifikasi berbagai potensi yang ada di madrasah (sarana prasarana, dana, dan lain sebagainya). Kemudian proses sosialisasi ke berbagai pihak. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan visi dan misi serta tujuan madrasah yang sesuai dengan program PPK. Kemudian mendesain dan merumuskan berbagai program madrasah yang sesuai dengan nilai keutamaan lokal (nilai karakter)

yang telah ditetapkan.<sup>21</sup> Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan karakter.

Tahapan perencanaan program PPK sudah sesuai dengan Perbub Nomor 65 Tahun 2017. Proses perencanaan program PPK diawali dengan pembentukan tim pengembang. Tim pengembang dibentuk di bawah kepemimpinan kepala madrasah yang diperkuat dengan Keputusan Kepala Madrasah MI Ma'arif Sendang Kulon Progo No 174/kpts/1/2018 tentang pembagian tugas guru. Tim pengembang diantaranya yaitu tim tata tertib untuk kegiatan pembiasaan, serta tim ekstrakurikuler untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Setelah tim pengembang terbentuk maka dilakukan identifikasi berbagai potensi yang ada di madrasah. Identifikasi potensi didapatkan melalui manajemen *review* dalam kegiatan evaluasi diri madrasah pada awal tahun pelajaran. Identifikasi potensi ini dilakukan untuk menetapkan nilai-nilai karakter dan indikator keberhasilan yang di prioritaskan, sumber daya dan sarana yang diperlukan, serta prosedur penilaian keberhasilan.

Dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai karakter tersebut

---

<sup>21</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor: 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan karakter, hlm. 13-14.

dikembangkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Indikator keberhasilan kebijakan program PPK antara lain meningkatnya ketertiban siswa, meningkatnya prestasi belajar siswa, munculnya nilai-nilai karakter/budaya dalam diri siswa, lulusan terserap dalam SMP dan MTs Negeri yang Favorit serta secara lebih lengkap termuat dalam rencana kerja tahunan madrasah dan buku saku tata tertib siswa MI Ma'arif Sendang Karangasari Pengasih Kulon Progo.<sup>22</sup>

Sumber dana kebijakan program PPK di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo didapatkan dari RAPBM, APBD dana Pembiayaan SD/MI Swasta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 210.000 persiswa pertahun, serta komite madrasah.<sup>23</sup> Gerakan PPK tidak dimaksudkan untuk menambah beban madrasah dan orang tua. Pembiayaan program PPK melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara mandiri dan gotong royong. Pembiayaan program PPK di menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, madrasah, dan komite madrasah.

Untuk mencapai keberhasilan yang maksimal maka setiap pihak harus saling bekerja sama dan komitmen dalam proses pelaksanaan program PPK,

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Kasmad Rifangi Selaku Kepala MI Ma'arif Sendang, pada Senin, 20 Agustus 2018.

<sup>23</sup> Dokumen RAPBM MI Ma'arif Sendang TP. 2018/2019, Hasil Observasi Senin, 20 Agustus 2018.

oleh karena itu proses sosialisasi sangat diperlukan. Madrasah melakukan sosialisasi PPK kepada para pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite madrasah, orang tua/wali siswa, siswa, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat yang relevan, dan masyarakat lainnya). Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai hal di antaranya melalui kegiatan masa orientasi madrasah, melalui pertemuan paguyuban orang tua wali kelas, dan *event-event* yang sesuai seperti upacara dan peringatan hari keagamaan.

Kemudian menetapkan visi dan misi madrasah. Penguatan pendidikan karakter terintegrasi dalam visi misi madrasah. Visi MI Ma'arif Sendang Kulon Progo yang tertuang dalam RKJM yaitu mewujudkan madrasah yang berwawasan lingkungan, yang menghasilkan SDM berakhlak mulia, cerdas, berjiwa wirausaha, dan mampu bersaing di era global. Sementara untuk misi madrasah yang terkait penguatan pendidikan karakter dapat dilihat di poin 3 yaitu mengamalkan agama dan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan seluruh komponen madrasah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter telah diintegrasikan dalam visi dan misi MI Ma'arif Sendang Kulon Progo.

Langkah selanjutnya yaitu mendesain dan merumuskan berbagai kebijakan program madrasah yang sesuai dengan nilai budaya yang telah ditetapkan. Dalam implementasi penguatan pendidikan karakter sesuai dengan Peraturan Bupati No 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pasal 7 bahwa penguatan pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dalam mendesain dan merumuskan program PPK di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan luar pembelajaran.

Dengan demikian, madrasah harus mendesain dan merumuskan kebijakan program PPK dalam kegiatan pembelajaran dan di luar pembelajaran. Madrasah membuat program-program tersebut dalam rangka menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik. Mengingat fungsi penguatan pendidikan karakter sangat penting bagi peserta didik maka perlu dilakukan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan melalui berbagai program tersebut agar kelak menjadi manusia yang berkarakter baik cerdas secara intelektual maupun cerdas secara moral.

#### **D. Pelaksanaan Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di madrasah MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

Pada variabel pelaksanaan kebijakan program PPK, angket yang digunakan berisi 14 butir pertanyaan yang meliputi (1) Pedoman Pelaksanaan Program PPK 1 butir, dan (2) Strategi Pelaksanaan Program PPK 13 butir. Hasil perhitungan indikator pelaksanaan program PPK sebagai berikut:

Tabel 3.8.

Hasil Penelitian Pelaksanaan Program PPK<sup>24</sup>

No.	Indikator	Prosentase	Keterangan
1.	Pedoman Pelaksanaan Program PPK	83,33	Sangat Baik
2.	Strategi Pelaksanaan Program PPK	80,70	Baik
	Jumlah keseluruhan	82,05	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo telah dilaksanakan dengan sangat baik. Pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter mencapai 82.05% yang terdiri dari pedoman pelaksanaan program PPK 83.33%, dan strategi pelaksanaan program PPK 80.70%.

Berdasarkan data hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan program penguatan pendidikan karakter (PPK) telah dilaksanakan dengan sangat baik. Data pelaksanaan program PPK di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo mencapai 82.05% dengan sebaran data yaitu pedoman pelaksanaan program PPK 83.33%, dan strategi pelaksanaan program PPK 80.70%. Data tersebut diperoleh dari angket tertutup dan diperkuat dengan angket terbuka, wawancara, dan dokumentasi. MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo telah melaksanakan kebijakan program PPK berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo No 65 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Selain itu dibuat

---

<sup>24</sup> Hasil Penilaian melalui Angket kepada 9 Guru MI Ma'arif Sendang, Observasi penyebaran Angket pada Senin, 20 Agustus 2018

buku saku tata tertib yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK). Penyelenggaraan kebijakan program penguatan pendidikan di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo dibagi menjadi 3 jalur yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan pembiasaan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Berbagai kebijakan program tersebut kemudian didesain agar dapat menanamkan nilai-nilai karakter yang ada.

#### 1. Mengintegrasikan Pada Mata Pelajaran (Tematik)

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa pada peserta didik, sehingga dengan berjalannya kegiatan pembelajaran nanti sudah mengarah pada karakter peserta didik yang ditanamkan. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran dilakukan dengan memasukkan 18 nilai karakter dan budaya bangsa dalam semua mata pelajaran. Nilai karakter ditentukan berdasarkan KI/KD serta dimuat dalam RPP atau silabus.

Hal ini sesuai dengan rencana kerja tahunan MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo. Misalnya dalam pembelajaran matematika dengan materi pokok bangun datar diintegrasikan nilai karakter kedisiplinan, aktif, dan kejujuran. Jadi tidak semua mata pelajaran (tematik) menekankan nilai karakter yang sama namun disesuaikan dengan kegiatan dan materi pembelajaran.

## 2. Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan madrasah di luar pembelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan diri peserta didik. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi wadah untuk pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat pendidikan pengenalan diri dan pengembangan *soft skill* peserta didik. Bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia.

Kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo yaitu pramuka, pidato, seni membaca Al Quran (Tahfid Juz Amma dan Qiroati), Kaligrafi, Hadroh, Club Bahasa Inggris, dan Club MIPA. Nilai-nilai karakter diintegrasikan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut, misal sikap percaya diri dan tanggung jawab serta giat prestasi.<sup>25</sup>

Berikut contoh (foto) kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dalam rangka melaksanakan kegiatan program kebijakan tentang penguatan pendidikan karakter:

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kasmad Rifangi Selaku Kepala MI Ma'arif Sendang, pada Senin, 20 Agustus 2018.



Gambar : 3.9  
Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai Nasionalis  
Melalui Kegiatan Pramuka



Gambar : 3.10  
Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai Kerjasama  
Melalui Kegiatan Drumband

### 3. Melalui Kegiatan Pembiasaan

Selain kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan melalui budaya madrasah merupakan kegiatan di luar pembelajaran lain yang

digunakan sebagai wadah penanaman nilai-nilai karakter. Kebijakan program PPK melalui pembiasaan secara umum dapat dibagi menjadi 4 yaitu keteladanan, kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan pengkondisian. Bahwasanya kegiatan pembiasaan melalui budaya madrasah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga madrasah.

Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga madrasah. Kegiatan-kegiatan dilakukan di luar jam pembelajaran untuk memperkuat pembentukan karakter sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan.



Gambar : 3.11

Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai Religius  
(Solat Jenazah)



Gambar : 3.12

Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai Religius (Mengaji Setiap pagi hari pukul 07.00-08.00)

Pembiasaan melalui keteladanan. Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru dengan memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik. Hal ini di tunjukkan dengan guru dan semua warga madrasah berpartisipasi aktif dalam kegiatan rutin yang diselenggarakan pihak madrasah. Adapun bentuk lain dari pembiasaan melalui keteladanan yaitu dengan berpakaian rapi, datang tepat waktu, bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab, dan mengucapkan salam. Berbagai bentuk keteladanan yang dilakukan guru diharapkan para peserta didik dapat mencontoh sikap dan perilaku yang baik tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter tidak hanya dilaksanakan oleh peserta didik, namun melibatkan berbagai pihak.<sup>26</sup>



Gambar : 3.12  
Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai Religius Sholat Berjamaah

Pembiasaan melalui kegiatan rutin semisal budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), kegiatan bela negara yang diisi dari Polsek setempat, upacara bendera, jumat bersih, gerakan literasi, menyanyikan lagu nasional/daerah di awal dan akhir pembelajaran, berdoa di awal dan akhir pembelajaran, serta kegiatan agamis (shalat duhur berjamaah, sholat duha pada jam istirahat pertama, qiroati, pengajian, serta pesantren romadhon, sholat jenazah, safari sholat jumat, dan infak harian). Melalui berbagai pembiasaan kegiatan rutin diharapkan peserta didik di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dapat mempunyai akhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kasmad Rifangi Selaku Kepala MI Ma'arif Sendang, pada Senin, 20 Agustus 2018.



Gambar : 3.13  
Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai peduli lingkungan (membersihkan sampah di jalan)

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Gambar : 3.14  
Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai Menghargai Prestasi (Juara 3 CCA tingkat DIY)

Pembiasaan melalui kegiatan spontan misal bakti sosial, membersihkan sarana ibadah dan jalan, point pelanggaran untuk siswa yang melanggar tata tertib. Sebagai contoh ada perkelahian 2 siswa maka diberikan point pelanggaran kepada kedua siswa tersebut. Dengan *punishment* ini diharapkan siswa tidak akan mengulangi kembali berbagai perilaku yang menyimpang dari nilai karakter.

Sementara pembiasaan melalui pengkondisian antara lain *green school* (Jumat bersih) dan Jumat sehat (senam), program inovasi lingkungan, serta slogan yang mencerminkan nilai karakter. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan sekaligus mendukung adanya penguatan pendidikan karakter, sehingga nilai-nilai dapat terintegrasi secara menyeluruh ke dalam diri siswa.

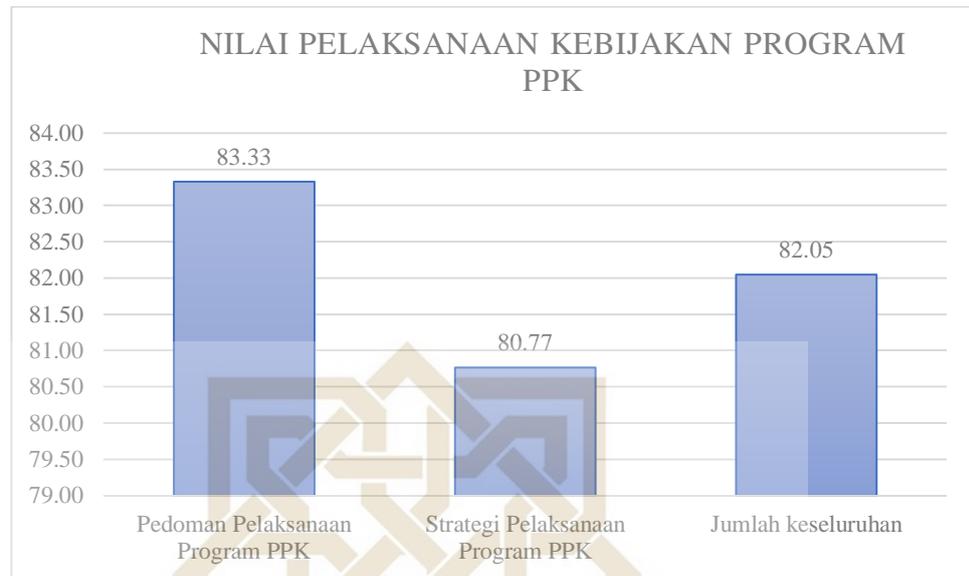


Gambar : 3.15

Pendidikan Karakter Siswa MI Ma'arif Sendang pada Nilai peduli lingkungan melalui Jumat bersih

Dapat direkam bahwa berdasarkan data hasil penelitian dari angket pelaksanaan kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Gambar 3.16**  
Nilai Pelaksanaan Program PPK

Dari gambar 3, dapat diketahui bahwa indikator dalam pelaksanaan kebijakan program pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo mempunyai pencapaian yang sangat baik. Namun pencapaian tiap indikator kurang merata. Pencapaian indikator tertinggi didapat dari pedoman pelaksanaan program PPK, kemudian strategi pelaksanaan program PPK.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala madrasah beserta angket terbuka diperoleh informasi bahwa madrasah telah melaksanakan kebijakan PPK. Pelaksanaan kebijakan PPK disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan program madrasah. Sementara dalam proses pelaksanaan dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Program PPK di madrasah dapat

dibagi menjadi 3 pokok utama yaitu pembiasaan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Selain tersebut di atas, yang dilakukan kepala MI Ma'arif Sendang adalah dalam pola pemberdayaan guru melalui penyuluhan, seminar, pelatihan, lokakarya atau sebagainya dapat meningkatkan pemahaman guru dan pengetahuannya akan sikap, nilai, dan norma yang harus diterapkan pada dirinya sendiri lalu kemudian untuk membimbing peserta didik melalui karakter yang positif, dapat juga diterapkan program *best practice* bagi peserta didik yang dibimbing melalui proses pembiasaan pola hidup, guru mendampingi peserta didik sehingga mereka merasa nyaman dengan proses tersebut, di sinilah nanti yang selanjutnya akan menjadi landasan terciptanya pribadi-pribadi yang unggul, melalui pembiasaan ini nanti diharapkan peserta didik akan dapat melakukan perubahan dirinya kearah yang lebih baik (positif), sehingga nantinya dapat menjadi peserta didik yang berkarakter kuat. Dalam pembiasaan pola hidup ini guru menjadi pihak yang sangat dibutuhkan dalam membimbing peserta didik, guru akan menjadi pendukung utama dalam proses keberhasilan pendidikan karakter.

Pelaksanaan dari PPK melalui kegiatan pembiasaan melibatkan seluruh komponen sebagai berikut: (1) Kepala madrasah, bertindak sebagai pengawas yang mengawasi dan membina mulai dari guru, staf dan karyawan bahkan peserta didik. Untuk membina guru staf dan karyawan biasanya dilakukan dengan rapat dinas. Sedangkan untuk peserta didik dilakukan dengan

pengarahan langsung di kelas-kelas atau di dalam amanat upacara; (2) Guru, bertindak sebagai orang yang melaksanakan PPK itu sendiri di dalam kelas. Baik yang tercantum pada RPP maupun tidak. Selain itu guru juga bertindak mengawasi dan membina peserta didik di luar kelas pada setiap pelaksanaan pembiasaan. Guru juga harusnya bisa mengingatkan rekan yang lainnya dalam pelaksanaan PPK ini; (3) Tukang Kebun, beliau bertugas sebagai teknisi sekolah juga yang mengecek dan mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan dalam kegiatan PPK melalui kegiatan pembiasaan. Beliau juga membantu dalam mendidik peserta didik mengenai lingkungan, kebersihan dan juga tanaman namun tidak secara langsung; (4) Komite Madrasah dan Paguyuban, dimana mereka sangat berperan dalam pelaksanaan terkait mungkin dana yang mereka berikan untuk melancarkan kegiatan. Selain itu mereka juga mengawasi jalannya kegiatan serta juga sebagai penanggungjawab atas keberlangsungan salah satu kegiatan yang mereka danai; dan (5) Tenaga Administrasi madrasah, di mana semua orang harus terlibat dalam PPK sehingga untuk warga madrasah yang lain harus tetap saling mengingatkan dan memberi teladan terhadap warga madrasah yang lain.

Pelaksanaan PPK menjadi tanggung jawab semua warga MI Ma'arif Sendang diharapkan dapat mewujudkan karakter peserta didik yang baik. Adapun peran warga MI Ma'arif Sendang selengkapnya sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Kepala Madrasah

- a. menunjukkan keteladanan perilaku beretika;
- b. mendampingi guru dan peserta didik agar dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat;
- c. menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang tujuan PPK;
- d. memastikan bahwa pendidikan karakter diterapkan dalam kurikulum secara komprehensif; dan
- e. mengapresiasi usaha dan partisipasi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan PPK.

2. Guru

- a. menunjukkan keteladanan perilaku beretika;
- b. mendukung terbentuknya hubungan yang baik antar guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya;
- c. membangun lingkungan pembelajaran yang mengapresiasi dan menghargai keunikan individu;
- d. bertanggung jawab untuk melaksanakan modul PPK;
- e. mengintegrasikan PPK dalam program pembelajaran;

---

<sup>27</sup> Dokumen Program Penguatan Pendidikan Karakter MI Ma'arif Sendang Tahun 2018/2019, Observasi pada hari Senin, 20 Agustus 2018

- f. menggunakan metode pembelajaran yang tepat; dan
- g. membimbing peserta didik untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat.

### 3. Tenaga Kependidikan

- a. menunjukkan keteladanan perilaku beretika;
- b. mendukung terbentuknya hubungan yang baik antar tenaga kependidikan, guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya;
- c. menjadi rekan kerja yang sinergis dengan guru dalam penumbuhan karakter peserta didik;
- d. menjadi teladan bagi peserta didik melalui sikap/perbuatan dan ucapan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah; dan
- e. mendukung seluruh program PPK di sekolah sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

### 4. Peserta Didik

- a. terbiasa bersyukur kepada Tuhan dan rela membantu sesama;
- b. mampu membedakan hak dan kewajiban;
- c. bekerja sama dan menerima keberagaman;
- d. mematuhi peraturan tata tertib sekolah;
- e. mengatasi kesulitan yang dihadapi;
- f. menata lingkungannya;
- g. melaksanakan tugas secara mandiri;
- h. bermusyawarah dan mematuhi hasil musyawarah;

- i. berusaha berprestasi dan menghargai hasil karya orang lain;
- j. berkomunikasi dengan sopan dan bertingkah laku yang baik;
- k. mendamaikan teman yang berselisih, menjaga keamanan barang milik teman/ satuan pendidikan, dan menjaga keselamatan diri sendiri/teman;
- l. gemar membaca buku;
- m. menghormati kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang yang lebih tua dan warga sekolah;
- n. menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekolah;
- o. mengakui kesalahan dan saling memaafkan; dan
- p. melaksanakan tugas yang diberikan madrasah.

#### **E. Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di madrasah MI Ma'arif Sendang Kulon Progo**

Pada variabel evaluasi program PPK, angket yang digunakan berisi 11 butir pertanyaan yang meliputi (1) Tim Evaluasi Program PPK 1 butir, (2) Proses Evaluasi Program PPK 7 butir, dan (3) Tindak Lanjut Program PPK 3 butir. Hasil perhitungan indikator evaluasi program PPK sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Hasil Penelitian Evaluasi Program PPK<sup>28</sup>

No.	Indikator	Prosentase	keterangan
1.	Tim Evaluasi Program PPK	86,11	Sangat Baik
2.	Proses Evaluasi Program PPK	80,16	Baik

<sup>28</sup> Hasil Penilaian melalui Angket kepada 9 Guru MI Ma'arif Sendang, Observasi penyebaran Angket pada Senin, 20 Agustus 2018.

3.	Tindak Lanjut Program PPK	81,48	Sangat Baik
	Jumlah keseluruhan	82,48	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo telah dilaksanakan dengan baik. Evaluasi kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter mencapai 82.48% yang terdiri dari tim evaluasi program PPK 86.11%, proses evaluasi program PPK 80.15%, dan tindak lanjut program PPK 81.48%.

Dalam setiap pelaksanaan program madrasah tentu menginginkan hasil yang sesuai harapan. Oleh karena itu untuk mengetahui hasil dari suatu kebijakan program diperlukan proses evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan program madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan.

Berdasarkan data hasil penelitian, evaluasi kebijakan program penguatan pendidikan karakter (PPK) telah dilaksanakan dengan baik. Data evaluasi program PPK di MI Ma'arif Sendang Karang Sari Pengasih Kulon Progo mencapai 82.48% dengan sebaran data yaitu tim evaluasi program PPK 86.11%, proses evaluasi program PPK 80.15%, dan tindak lanjut program PPK 81.48%. Data tersebut diperoleh dari angket tertutup dan diperkuat dengan angket terbuka, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam proses evaluasi kebijakan program penguatan pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo tahapan pertama yaitu pembentukan tim evaluasi. Tim evaluasi ini merupakan gabungan dari manajemen madrasah beserta anggota tim pengembang program PPK. Setelah terbentuk tim evaluasi tentu dilanjutkan dengan perumusan indikator program PPK untuk proses pengumpulan data. Indikator program sesuai dengan rancangan yang telah disusun sebelumnya dalam proses perencanaan. Indikator untuk program PPK yang terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan indikator penilaian sikap yang termuat dalam RPP. Sementara untuk program PPK yang terintegrasi dalam kegiatan di luar pembelajaran, indikatornya disesuaikan dengan program-program terkait yang semuanya tertuang dalam buku saku tata tertib.

Pada proses pengumpulan data dilakukan dengan cara analisa pelaksanaan program, pengamatan perubahan tingkah laku anak, laporan pengamatan perilaku karakter peserta didik, dan penilaian lewat penskoran. Dalam program PPK yang terintegrasi dengan proses pembelajaran, guru melakukan penilaian secara kognitif dan afektif yang mengacu dalam nilai-nilai pendidikan karakter menggunakan pedoman penilaian yang telah disusun sebelumnya dalam perencanaan pembelajaran. Namun dalam penilaian tidak bisa secara objektif satu persatu melainkan hanya dinilai karakter peserta didik yang paling

menonjol baik menonjol dalam arti positif maupun menonjol dalam arti negatif. Pedoman evaluasi ini terdapat satu lembar tersendiri mengenai lembar pengamatan penilaian sikap.

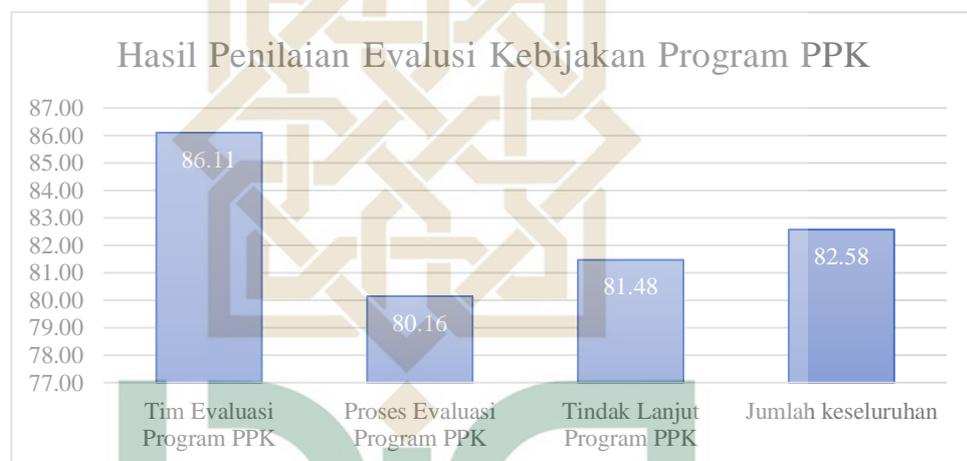
Kemudian untuk evaluasi kebijakan program PPK di luar pembelajaran dilakukan melalui analisa pelaksanaan program melalui rapat kerja guru, pengamatan perubahan tingkah laku anak, laporan pengamatan perilaku karakter peserta didik, dan penskoran yan semuanya tertuang dalam buku tata tertib MI Ma'arif Sendang Kulon Progo. Setiap terjadi pelanggaran maka peserta didik yang melakukan pelanggaran akan mendapat poin dari guru sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Setelah berbagai data tersebut terkumpul maka dilakukan pengolahan. Dari hasil olahan data mengenai pelaksanaan program PPK kemudian disimpulkan dan dilakukan tindak lanjut. Untuk tindak lanjut dari proses evaluasi yaitu melakukan berbagai pembenahan program PPK, memaksimalkan berbagai daya dukung, menjalin kekompakan atau perstuan antar personil untuk memperbaiki kekurangan program PPK yang sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasmad Rifangi, selaku kepala MI Ma'arif Sendang Kulon Progo bahwasanya evaluasi pendidikan karakter menggunakan catatan pembinaan siswa dan buku tata tertib. Pada intinya evaluasi kebijakan program PPK di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo telah dilaksanakan dan berjalan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya

lembar pengamatan penilaian sikap siswa atau lembar poin pelanggaran yang termuat dalam buku tata tertib siswa dalam evaluasi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo.

Berdasarkan data hasil penelitian dari angket evaluasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut:



Gambar 3.18  
Hasil Penilaian Evaluasi Kebijakan Program PPK

Dari gambar 4 dapat diketahui bahwa indikator dalam evaluasi program pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo mempunyai pencapaian yang baik. Namun pencapaian tiap indikator masih tetap kurang merata. Pencapaian indikator tertinggi didapat dari tim evaluasi program PPK, kemudian tindak lanjut program PPK, dan yang terakhir proses evaluasi program PPK.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala madrasah beserta angket terbuka diperoleh informasi bahwa sekolah telah melaksanakan evaluasi program PPK. Proses evaluasi program PPK dapat dilakukan secara darurat sebulan sekali serta secara berkala 3 bulan sekali. Tim evaluasi menyusun berbagai indikator program PPK untuk proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan. Dari hasil olahan data mengenai pelaksanaan program PPK kemudian disimpulkan dan dilakukan tindak lanjut.

Data penelitian secara keseluruhan diperoleh dari hasil angket, dokumen, serta wawancara yang diambil di MI Ma'arif Kulon Progo. Subjek penelitian dalam pengambilan data ini meliputi kepala madrasah dan guru dengan total subjek penelitian sebanyak 1 orang kepala madrasah dan 9 orang guru. Data dalam penelitian pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo ini mencakup data perencanaan kebijakan Program PPK, pelaksanaan kebijakan program PPK, dan evaluasi kebijakan program PPK. Berikut deskripsi data yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

Selanjutnya dikategorikan hasilnya pada masing-masing variabel dengan menggunakan rumus yang telah dituliskan pada bagian teknik analisa data pada bab I sub metodologi. Berikut hasil pengkategorianya.<sup>29</sup>

Tabel 3.19  
Pengkategorian Hasil Penelitian

---

<sup>29</sup> Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan ...*, (Bandung: Angkasa, 2013), hlm 201.

No.	Indikator	Prosesntase	Keterangan
1.	Perencanaan Kebijakan Program PPK	83,06	Sangat Baik
2.	Pelaksanaan Kebijakan Program PPK	82,05	Sangat Baik
3.	Evaluasi Kebijakan Program PPK	82,58	Sangat Baik
	Rata-rata	82,57	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo telah dilaksanakan dengan sangat baik, dengan mencapai 82.57 %. Berdasarkan data hasil penelitian tersebut dapat digambarkan dengan diagram seperti berikut:



Gambar 3.20  
Diagram Pelaksanaan Kebijakan Program PPK

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa hasil penelitian pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo secara keseluruhan terkategori sangat baik.

Kegiatan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim pengawas dan pembina dalam pelaksanaan pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo telah dilakukan melalui kegiatan pengawasan, refleksi, analisa, dan tindak lanjut. Hal ini merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam kegiatan evaluasi menurut Made bahwa “suatu kegiatan harus dapat dievaluasi melalui kegiatan pengawasan, refleksi, analisa, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara baik dan dapat memberikan koreksi pada kegiatan yang dianggap tidak berjalan atau mendapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan baik sebagian maupun menyeluruh.”<sup>30</sup>

Evaluasi program pendidikan karakter di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo dilakukan secara bersama-sama antara kepala sekolah, pengawas Pembina dan tim perumus, pelaksana dan tim pengawasan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh unsur yang terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan pengawasan oleh tim pengawas dimaksudkan untuk dapat menjangring informasi dan memberikan kontrol terhadap tim pelaksana yang melakukan kegiatan pendidikan karakter, sehingga tim perumus dapat

---

<sup>30</sup> Made, I.K. Manajemen Sekolah Dasar. Jakarta: Dirjen Dikdasmen – Depdiknas, 1998, hlm. 212

memberikan tanggapan terhadap hasil kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan sesuai atau tidak dengan rencana dan strategi yang disusun. Selanjutnya kegiatan refleksi dilakukan oleh tim perumus dan pengawas untuk direkomendasikan pada tim pelaksana dalam memperbaiki dan meningkatkan aspek kegiatan yang dianggap memiliki kekurangan dan kelebihan. Sedangkan hasil pelaksanaan perbaikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dikembangkan menjadi suatu ketetapan dan menjadi suatu simpulan dari hasil kegiatan pendidikan karakter siswa di MI Ma'arif Sendang Kulon Progo yang kemudian akan dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan dan penyempurnaan.

Keterangan yang diperoleh ini didukung oleh Ditjen PMPTK, bahwa “monitoring dan evaluasi terhadap suatu program harus dilakukan secara tepat dan berkelanjutan, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan perbaikan pada kinerja pelaksana kegiatan pada aspek-aspek tindakan yang dianggap bermasalah dan mengandung kelemahan yang signifikan.”<sup>31</sup> Sedangkan Made, menguraikan bahwa “evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan tujuan agar kegiatan dianggap memiliki unsur kelemahan dan kekuatan dapat dilakukan tindak lanjut berupa perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap benar-benar telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam perencanaan program

---

<sup>31</sup> Ditjen PMPTK. *Pengembangan Budaya dan Iklim Pembelajaran di Sekolah (materi diklat pembinaan kompetensi calon kepala sekolah/kepala sekolah)*. Jakarta: Depdiknas, 2007, hlm.16.

sebelumnya.”<sup>32</sup> Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa teori pendukung yang dikemukakan ini memiliki keterkaitan dan hubungan yang sesuai dengan pelaksanaan evaluasi kebijakan program yang dilakukan oleh manajemen MI Ma’arif Sendang Kulon Progo.



---

<sup>32</sup> Made, I.K. *Manajemen Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen – Depdiknas, 1998, hlm.218.